

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Strategi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



**OLEH :**

**NAMA : PUTRI NUR HASANAH HALAWA  
NPM : 2105170076  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : PUTRI NUR HASANAH HALAWA  
NPM : 2105170076  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DELI SERDANG)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

(Edisah Putra Nainggolan, S.E, M.Ak)

Pembimbing

(Elizar Sipambela, S.E., M.Si)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

(Dr. Radiman, S.E., M.Si.)

(Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

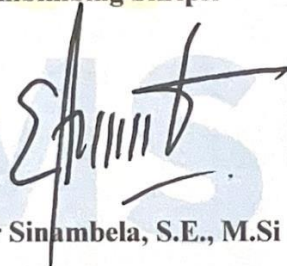
Skripsi ini disusun oleh:

Nama : PUTRI NUR HASANAH HALAWA  
N P M : 2105170076  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN DENGAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI  
SERDANG)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
Tugas Akhir.

Medan, November 2025

Pembimbing Skripsi



Elizar Sinambela, S.E., M.Si

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi  
Ketua Program Studi Akuntansi



M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



M. Shareza Hafiz, S.E., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

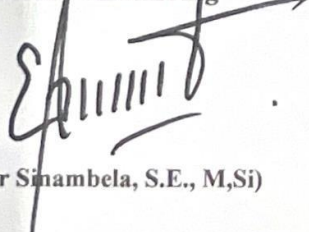
Nama : PUTRI NUR HASANAH  
 N P M : 2105170076  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG)

| Item                          | Hasil Evaluasi                                                                                                                           | Tanggal  | Paraf Dosen |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Bab 1                         | - lengkapi data penelitian<br>- Perjelas masalah penelitian berdasar data dan di dukung teori.                                           | 23/10-25 | Et.         |
| Bab 2                         | - Teori sekaitan dgn variabel.<br>- kumpian sekaitan pedoman.                                                                            | 28/10-25 | Et.         |
| Bab 3                         | - Teknik Analisis dan diperbaiki.                                                                                                        | 28/10-25 | Et.         |
| Bab 4                         | - Perjelas Pembahasan berdasarikan hasil penelitian.<br>- Perbaiki pembahasan sevai variabel yg diteliti<br>- Ungkapkan hasil penelitian | 11/11-25 | Et.         |
| Bab 5                         | - Kesimpulan & saran sekaitan dgn hasil penelitian.                                                                                      | 18/11-25 | Et.         |
| Daftar Pustaka                | - lengkapi Daftar pustaka sekaitan kethp yang ada di skripsi                                                                             | 17/11-25 | Et.         |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | Selesai bimbingan.<br>Acc di Ujikan pada Sidang Meja Hijau                                                                               | 17/11-25 | Et.         |

Medan, 2025

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing



(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)



(M. Saureza Hafiz, S.E., M.Acc)

## ABSTRAK

# **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDIBADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG)**

**Putri Nur Hasanah Halawa**  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[nurhasanahputri@gmail.com](mailto:nurhasanahputri@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi bulanan Penerimaan Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah, dan Laporan Kinerja Keuangan Daerah periode 2021-2023, sehingga diperoleh 36 observasi data bulanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah tidak berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dalam hubungan antara Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan, yang mengindikasikan bahwa pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan bersifat langsung tanpa melalui mediasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Air Tanah, serta kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan strategi diversifikasi dan optimalisasi seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal dan kinerja keuangan berkelanjutan daerah.

**Kata Kunci : Pajak Air Tanah, Kinerja Keuangan Berkelanjutan, Pendapatan Asli Daerah**

## ABSTRACT

### **THE EFFECT OF GROUNDWATER TAX REVENUE ON SUSTAINABLE FINANCIAL PERFORMANCE WITH REGIONAL ORIGINAL REVENUE AS AN INTERVENING VARIABLE (A STUDY AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF DELI SERDANG REGENCY)**

**Putri Nur Hasanah Halawa**  
Department of Accounting  
Faculty of Economics and Business  
Muhammadiyah University of North Sumatera  
[nurhasanahputri@gmail.com](mailto:nurhasanahputri@gmail.com)

This research aims to examine and analyze the effect of Groundwater Tax Revenue on Sustainable Financial Performance with Regional Original Revenue as an intervening variable at the Regional Revenue Agency of Deli Serdang Regency. The research method used is a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques using the SPSS application. Data collection was carried out through documentation methods using secondary data in the form of monthly realization reports of Groundwater Tax Revenue, Regional Original Revenue, and Regional Financial Performance Reports for the 2021-2023 period, resulting in 36 monthly data observations. The research results show that Groundwater Tax Revenue has a positive and significant effect on Sustainable Financial Performance. Meanwhile, Regional Original Revenue does not play a significant intervening variable role in the relationship between Groundwater Tax Revenue and Sustainable Financial Performance, indicating that the effect of Groundwater Tax Revenue on Sustainable Financial Performance is direct without mediation through Regional Original Revenue. Based on these research findings, it is recommended that the Regional Revenue Agency reform the tax administration system, conduct intensification and extensification of Groundwater Tax collection, and the Regional Government formulate diversification and optimization strategies for all components of Regional Original Revenue to enhance fiscal independence and sustainable regional financial performance.

**Keywords : Groundwater Tax, Sustainable Financial Performance, Regional Original Revenue**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama Ayah saya Tercinta **Putra Kennedy Halawa** dan Ibunda Tersayang **Fitri Yani Ginting** yang dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP.** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Radiman, S.E., M.Si.** selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Nabilla Dwi Aginta, S.E., M.Sc.** selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M,Si** selaku Dosem Pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
10. Terimakasih kepada Putri Hasanah yang telah bertahan sampai akhir perkuliahan dan tetap berusaha mengerjakan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Amin Ya Rabbal Alamin...

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, November 2025

**Putri Nur Hasanah Halawa**

## DAFTAR ISI

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>             | <b>ix</b>   |
| <br>                                  |             |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>        | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....       | 1           |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....        | 11          |
| 1.3 Rumusan Masalah .....             | 11          |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....            | 11          |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....          | 12          |
| <br>                                  |             |
| <b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>     | <b>13</b>   |
| 2.1 Landasan Teori.....               | 13          |
| 2.2 Pendapatan Asli Daerah .....      | 15          |
| 2.3 Pajak Daerah .....                | 18          |
| 2.4 Hubungan Antar Variabel .....     | 24          |
| 2.5 Kerangka Berpikir Konseptual..... | 27          |
| 2.6 Hipotesis Penelitian.....         | 28          |
| <br>                                  |             |
| <b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>29</b>   |
| 3.1 Jenis Penelitian.....             | 29          |
| 3.2 Definisi Operasional.....         | 29          |
| 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian ..... | 31          |
| 3.4 Populasi dan Sampel .....         | 32          |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....      | 33          |
| 3.6 Teknik Analisis Data.....         | 33          |
| <br>                                  |             |
| <b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>   | <b>38</b>   |
| 4.1 Deskripsi Data .....              | 38          |
| 4.2 Analisis Data.....                | 43          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 4.3 Pembahasan .....        | 60        |
| <b>BAB 5 PENUTUP.....</b>   | <b>68</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....         | 68        |
| 5.2 Saran .....             | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        | <b>76</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli Serdang..... | 2  |
| Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Pajak Air dan Tanah Daerah Kab.Deli Serdang .....      | 7  |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....                                               | 26 |
| Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....                                                | 31 |
| Tabel 3. 2 Waktu Penelitian .....                                                   | 32 |
| Tabel 4. 1 Penerimaan Pajak Air Tanah 2021-2023 (dalam Rupiah).....                 | 39 |
| Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah 2021-2023 (dalam Rupiah).....                     | 40 |
| Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Berkelanjutan 2021-2023 .....         | 42 |
| Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....                                | 44 |
| Tabel 4. 5 Uji Normalitas Model 1.....                                              | 45 |
| Tabel 4. 6 Tabel Uji Normalitas Model 2.....                                        | 46 |
| Tabel 4. 7 Uji Multikolineritas Model 1.....                                        | 47 |
| Tabel 4. 8 Uji Multikolineritas Model 2.....                                        | 48 |
| Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi Model 1.....                                            | 51 |
| Tabel 4. 10 Uji Autokorelasi Model 2.....                                           | 52 |
| Tabel 4. 11 Hasil Analisis Linier Berganda Model 1 .....                            | 53 |
| Tabel 4. 12 Hasil Analisis Linier Berganda Model 2 .....                            | 53 |
| Tabel 4. 13 Hasil Uji t Model 1 .....                                               | 55 |
| Tabel 4. 14 Hasil Uji f Model 1.....                                                | 56 |
| Tabel 4. 15 Hasil Uji t Model 2.....                                                | 57 |
| Tabel 4. 16 Hasil Uji f Model 2.....                                                | 58 |
| Tabel 4. 17 Hasil Uji Determinasi (Uji R <sup>2</sup> ).....                        | 59 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual .....    | 28 |
| Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas Model 1 ..... | 49 |
| Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas Model 2.....  | 50 |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kinerja Keuangan daerah merupakan gambaran sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurut (Febriyanti, 2022), kinerja keuangan daerah merupakan tolok ukur penting keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang ditandai dengan efektivitas dalam menggali potensi pendapatan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Kinerja keuangan yang berkelanjutan sangat penting agar pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas fiskal jangka panjang, memenuhi kebutuhan pelayanan publik, serta mendukung pembangunan yang konsisten.

Dalam konteks otonomi daerah, kinerja keuangan menjadi tolok ukur penting keberhasilan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki kinerja keuangan baik ditandai dengan efektivitas dalam menggali potensi pendapatan, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta kemandirian dalam membiayai kebutuhan daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Dengan demikian, kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan menjadi syarat utama bagi daerah dalam mewujudkan pembangunan yang mandiri dan berkesinambungan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal didaerah tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola, merencanakan, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. Bapenda memiliki fungsi penting dalam memastikan penerimaan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan, melalui kegiatan pemungutan, pengawasan, hingga intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Oleh karena itu, kinerja Bapenda sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan kinerja keuangan berkelanjutan daerah.

**Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli Serdang Tahun 2021 – 2023 (dalam Rupiah)**

| Bulan     | Tahun 2021 |           |                | Tahun 2022 |           |                | Tahun 2023 |           |                |
|-----------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
|           | Anggaran   | Realisasi | Persentase (%) | Anggaran   | Realisasi | Persentase (%) | Anggaran   | Realisasi | Persentase (%) |
| Januari   | 118,5 M    | 60 M      | 50,6 %         | 125,7 M    | 67 M      | 53,3 %         | 138,2 M    | 68 M      | 49,2 %         |
| Februari  | 102,3 M    | 62 M      | 60,6 %         | 108,9 M    | 70 M      | 64,2 %         | 115,4 M    | 71 M      | 61,5 %         |
| Maret     | 145,2 M    | 66 M      | 45,4 %         | 139,4 M    | 75 M      | 53,8 %         | 149,7 M    | 75 M      | 50,1 %         |
| April     | 97,8 M     | 72 M      | 73,6%          | 115,6 M    | 81 M      | 70,0 %         | 107,8 M    | 81 M      | 75,1 %         |
| Mei       | 133,6 M    | 75 M      | 56,1 %         | 147,2 M    | 84 M      | 57,0 %         | 136,5 M    | 84 M      | 61,5 %         |
| Juni      | 121,4 M    | 78 M      | 64,2 %         | 103,8 M    | 88 M      | 84,7 %         | 122,3 M    | 89 M      | 72,7 %         |
| Juli      | 156,7 M    | 81 M      | 51,6 %         | 132,5 M    | 91 M      | 68,6 %         | 155,9 M    | 92 M      | 59,0 %         |
| Agustus   | 109,2 M    | 83 M      | 76,0 %         | 119,3 M    | 93 M      | 77,9 %         | 118,6 M    | 94 M      | 79,2 %         |
| September | 128,9 M    | 85 M      | 65,9 %         | 141,7 M    | 95 M      | 67,0 %         | 131,7 M    | 96 M      | 72,8 %         |
| Oktober   | 142,1 M    | 87 M      | 61,2 %         | 126,4 M    | 98 M      | 77,5 %         | 143,8 M    | 99 M      | 68,8 %         |
| November  | 114,8 M    | 90 M      | 78,3 %         | 134,9 M    | 102 M     | 75,6 %         | 128,4 M    | 102 M     | 79,4 %         |
| Desember  | 130,5 M    | 87 M      | 66,6 %         | 108,6 M    | 97 M      | 89,3 %         | 142,7 M    | 93 M      | 65,1 %         |
| Total     | 1,501 T    | 926 M     | 61,6 %         | 1,504 T    | 1,041 T   | 69,2 %         | 1,591 T    | 1,049 T   | 65,9 %         |

Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, 2023)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat adanya permasalahan serius terkait efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang selama periode 2021-2023. Meskipun secara nominal terjadi peningkatan realisasi dari Rp 926 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 1,041 T di tahun 2022 dan Rp 1,049 T pada tahun 2023, namun tingkat efektivitas PAD menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Capaian efektivitas PAD hanya mencapai 61,6% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 69,2% di tahun 2022, dan menurun menjadi 65,9% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan, pertumbuhan efektivitas PAD tidak menunjukkan akselerasi yang signifikan dan masih jauh di bawah standar optimal minimal 90% yang ditetapkan oleh (Halim & Kusufi, 2014), mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Analisis lebih mendalam terhadap pola realisasi bulanan mengungkapkan adanya ketidakstabilan yang konsisten sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2021, persentase capaian berfluktuasi antara 50% hingga 76%, dengan pola yang cenderung stagnan di kisaran 60-66% selama sebagian besar tahun. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan rentang persentase antara 50% hingga 80%, namun pola fluktuasi tetap terjadi tanpa menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari bulan ke bulan. Demikian pula pada tahun 2023, meskipun terdapat beberapa bulan dengan capaian di atas 75%, namun fluktuasi tetap terjadi dengan rentang persentase antara 50% hingga 70%. Ketidakstabilan ini mengindikasikan lemahnya konsistensi dalam strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

daerah, serta menunjukkan ketidakmampuan dalam mempertahankan momentum penerimaan yang stabil sepanjang tahun anggaran.

Fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya penurunan drastis pada bulan Desember di setiap tahun pengamatan, yang menunjukkan pola sistematis yang berulang. Bulan Desember 2021 mencatat capaian terendah sebesar 66,6% dengan realisasi hanya Rp 87 miliar dari target Rp 130,5 miliar, Desember 2022 menunjukkan perbaikan dengan capaian 89,3% (Rp 97 miliar dari target Rp 108,6 miliar), namun Desember 2023 kembali mengalami penurunan tajam menjadi 65,1% (Rp 93 miliar dari target Rp 142,7 miliar). Pola penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, dimana target yang ditetapkan di akhir tahun cenderung tidak realistis atau terdapat kendala sistemik dalam proses pemungutan. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara perencanaan anggaran dengan kapasitas riil dalam pencapaian target, yang pada akhirnya mengancam stabilitas dan prediktabilitas penerimaan daerah sebagai fondasi penting dalam mewujudkan kinerja keuangan berkelanjutan.

Dalam konteks kinerja keuangan berkelanjutan, ketidakstabilan efektivitas PAD ini bertentangan dengan prinsip fiscal sustainability yang dikemukakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, 2015). OECD mendefinisikan keberlanjutan fiskal sebagai kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kebijakan fiskal jangka panjang tanpa menimbulkan risiko krisis keuangan maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Fluktuasi yang terjadi di

Kabupaten Deli Serdang menunjukkan ketidakprediktabilan dalam pengelolaan keuangan yang dapat mengancam stabilitas fiskal jangka panjang.

Menurut (Rizky et al., 2023), efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi dan stabilitas dalam proses pemungutan, dimana fluktuasi ekstrem dalam penerimaan pajak mengindikasikan lemahnya infrastruktur administrasi pajak dan sistem monitoring yang tidak terstandarisasi. Data yang menunjukkan ketidakstabilan efektivitas PAD mengindikasikan bahwa Kabupaten Deli Serdang belum memenuhi kriteria ini. Ketidakprediktabilan dalam penerimaan PAD dapat mengganggu perencanaan pembangunan jangka panjang dan berpotensi menciptakan ketergantungan yang lebih besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Paradoks antara surplus anggaran dengan rendahnya efektivitas PAD menunjukkan bahwa surplus yang terjadi bersifat semu dan bukan merupakan hasil dari efisiensi pengelolaan keuangan. Menurut (Hidayat, 2024) surplus anggaran yang berkelanjutan harus didasarkan pada kemampuan riil daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, bukan karena penetapan target yang terlalu konservatif, sehingga mencerminkan kinerja keuangan yang sesungguhnya.

Dari perspektif teori kemandirian fiskal, (Halim, 2014) menyatakan bahwa daerah dengan kinerja keuangan berkelanjutan harus mampu menunjukkan tren peningkatan kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap total pendapatan asli daerah secara konsisten. Fluktuasi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang justru menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga konsistensi pencapaian, yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Implikasi dari kondisi ini adalah meningkatnya risiko ketidakstabilan keuangan daerah dalam jangka panjang. Ketidakmampuan dalam mempertahankan efektivitas PAD yang konsisten dapat mengganggu kemampuan pembiayaan pembangunan berkelanjutan, mengurangi ruang fiskal untuk investasi infrastruktur, serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan komponen-komponen PAD, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah seperti Pajak Air Tanah yang memiliki potensi strategis dalam mendukung kinerja keuangan berkelanjutan.

Salah satu jenis pajak daerah yang berperan strategis adalah pajak air tanah. Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pajak Air Tanah tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh sebab itu, optimalisasi pemungutan Pajak Air Tanah dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam kerangka kinerja keuangan daerah, Pajak Air Tanah memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak serta efisiensi pengelolaan sumber daya. Pajak ini juga mencerminkan peran daerah dalam mengatur pemanfaatan air tanah agar lebih terukur dan berkeadilan. Dengan pengelolaan yang optimal, Pajak Air Tanah dapat menjadi salah satu penopang penting Pendapatan Asli Daerah sehingga berdampak positif terhadap pencapaian

kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan.

Namun, realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang selama periode 2021-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2022 mencatatkan capaian yang melampaui target, tetapi pada tahun 2021 dan 2023 realisasinya jauh di bawah target. Fluktuasi ini menandakan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah, seperti kurang optimalnya pendataan wajib pajak, lemahnya pengawasan, atau menurunnya aktivitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan strategi intensifikasi agar Bapenda mampu meningkatkan penerimaan pajak secara konsisten untuk mendukung kinerja keuangan berkelanjutan daerah.

**Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Pajak Air dan Tanah Daerah Kab.Deli Serdang Tahun 2021 – 2023**

| Bulan     | Tahun 2021 |           |                | Tahun 2022 |           |                | Tahun 2023 |           |                |
|-----------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
|           | Anggaran   | Realisasi | Persentase (%) | Anggaran   | Realisasi | Persentase (%) | Anggaran   | Realisasi | Persentase (%) |
| Januari   | 1,62 M     | 448 Jt    | 27,6 %         | 1,55 M     | 469 Jt    | 30,2 %         | 1,76 M     | 1 M       | 56,8 %         |
| Februari  | 1,57 M     | 587 Jt    | 37,3 %         | 1,51 M     | 516 Jt    | 34,1 %         | 1,73 M     | 991 Jt    | 57,2 %         |
| Maret     | 1,59 M     | 514 Jt    | 32,3 %         | 2,52 M     | 714 Jt    | 28,3%          | 2,73 M     | 986 Jt    | 36,1 %         |
| April     | 1,58 M     | 543 Jt    | 34,3 %         | 3,51 M     | 2,1 M     | 59,8 %         | 1,72 M     | 742 Jt    | 43,1 %         |
| Mei       | 1,6 M      | 449 Jt    | 28,0 %         | 4,63 M     | 3,2 M     | 69,1 %         | 2,74 M     | 1,1 M     | 40,1 %         |
| Juni      | 1,59 M     | 624 Jt    | 39,2 %         | 4,24 M     | 3,1 M     | 73,1 %         | 1,73 M     | 771 Jt    | 44,5 %         |
| Juli      | 1,59 M     | 440 Jt    | 27,6 %         | 4,53 M     | 2,1 M     | 46,3 %         | 1,74 M     | 861 Jt    | 49,4 %         |
| Agustus   | 1,59 M     | 359 Jt    | 22,5 %         | 4,72 M     | 2,1 M     | 44,4 %         | 2,73 M     | 1 M       | 36,6 %         |
| September | 1,58 M     | 677 Jt    | 42,8 %         | 4,13 M     | 1,6 M     | 38,7 %         | 1,96 M     | 609 Jt    | 31,0 %         |
| Oktober   | 1,59 M     | 542 Jt    | 34,0 %         | 5,52 M     | 3,6 M     | 65,2 %         | 1,83 M     | 780 Jt    | 42,6 %         |
| November  | 1,58 M     | 732 Jt    | 46,3 %         | 4,52 M     | 784 Jt    | 17,3 %         | 1,73 M     | 459 Jt    | 26,5 %         |
| Desember  | 1,58 M     | 469 Jt    | 29,6 %         | 3,21 M     | 1,3 M     | 40,4 %         | 2,88 M     | 1,1 M     | 38,1 %         |
| Total     | 19 M       | 6 M       | 31,5 %         | 44,59 M    | 22,1 M    | 49,5 %         | 25,28 M    | 10,5 M    | 41,5 %         |

Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, 2023)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terungkap fenomena volatilitas ekstrem dalam penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang yang sangat mengkhawatirkan dari perspektif pengelolaan keuangan daerah. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan pola yang sangat tidak stabil, dimulai dari capaian yang

sangat rendah pada tahun 2021 sebesar 31,5% dengan realisasi hanya Rp 6 miliar dari target Rp 19 miliar, kemudian mengalami lonjakan drastis menjadi 49,5% pada tahun 2022 dengan realisasi Rp 22,1 miliar yang melampaui target Rp 44,59 miliar, dan kembali turun secara signifikan menjadi 41,5% pada tahun 2023 dengan realisasi Rp 10,5 miliar dari target Rp 25,28 miliar. Volatilitas ekstrem ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang serius dalam sistem pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah, termasuk lemahnya infrastruktur administrasi pajak, ketidakadekuatan dalam pendataan wajib pajak, serta inkonsistensi dalam mekanisme pengawasan dan prosedur pemungutan yang seharusnya terstandarisasi.

Fenomena underperformance pada tahun 2021 dengan capaian hanya 31,5% menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam identifikasi objek pajak dan enforcement mekanisme pemungutan. Data bulanan tahun 2021 menunjukkan konsistensi yang mengkhawatirkan dengan persentase capaian yang stagnan di kisaran 22% hingga 42%, tanpa ada upaya signifikan untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun yang tetap rendah di 29,6%. Sebaliknya, fenomena overachievement pada tahun 2022 yang mencapai 49,5% justru mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran, dimana target yang ditetapkan terlalu konservatif atau terdapat faktor eksternal yang tidak terprediksi dalam proses penetapan anggaran.

Penurunan drastis dari 49,5% pada tahun 2022 menjadi 41,5% pada tahun 2023 semakin memperkuat argumen tentang ketidakstabilan sistemik dalam pengelolaan Pajak Air Tanah yang berdampak pada ketidakprediktabilan

penerimaan daerah. Data bulanan tahun 2023 menunjukkan konsistensi yang lebih baik dibandingkan tahun 2021 dengan persentase berkisar antara 26% hingga 57%, namun tetap jauh dari target yang ditetapkan dan tidak menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Ketidakmampuan dalam mempertahankan tingkat capaian yang konsisten mencerminkan lemahnya kapasitas institusional dalam mengelola sumber daya, mempertahankan database wajib pajak yang akurat, serta mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Volatilitas yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini sangat bertentangan dengan prinsip *certainty*, *consistency*, dan *predictability* yang menjadi prasyarat fundamental dalam sistem perpajakan daerah yang efektif, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran dan berpotensi mengganggu kontinuitas program pembangunan yang pada akhirnya mengancam tercapainya kinerja keuangan berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut teori administrasi pajak yang dikemukakan oleh (Bird & Zolt, 2005), efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi dan *predictability* dalam proses pemungutan. Fluktuasi yang sangat ekstrem seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang mengindikasikan lemahnya infrastruktur administrasi pajak, termasuk sistem pendataan wajib pajak, mekanisme pengawasan, dan prosedur pemungutan yang tidak terstandarisasi. Ketidakstabilan ini bertentangan dengan prinsip dasar administrasi pajak yang efektif yang mensyaratkan adanya *certainty* dan *consistency* dalam pelaksanaannya. Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, (Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa stabilitas dan *predictability* dalam penerimaan pajak daerah

merupakan prasyarat fundamental untuk sustainable fiscal management. Ketidakstabilan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Air Tanah dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan dan mengurangi efektivitas otonomi daerah dalam membiayai program-program prioritas.

Lebih lanjut, (Novita & Arza, 2024) menekankan bahwa fluktuasi yang ekstrem dalam penerimaan pajak daerah mengindikasikan inkonsistensi dalam upaya pemungutan pajak (tax effort), yang dapat menggambarkan lemahnya komitmen institusional, kurangnya kapasitas teknis, atau adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pemungutan. Ketidakmampuan dalam mempertahankan tingkat effort yang konsisten dapat menggambarkan lemahnya komitmen institusional, kurangnya kapasitas teknis, atau adanya faktor-faktor eksternal yang tidak terkontrol yang mempengaruhi kinerja pemungutan.

Pendapat (Fernandes & Putri, 2022) menambahkan bahwa volatilitas dalam penerimaan pajak daerah dapat disebabkan oleh lemahnya sistem informasi perpajakan, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan pemungutan pajak. Kondisi ini memerlukan reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi pajak daerah untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Implikasi dari volatilitas Pajak Air Tanah ini terhadap kinerja keuangan berkelanjutan sangat signifikan. Ketidakprediktabilan dalam komponen PAD dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran, mengganggu kontinuitas program pembangunan, dan berpotensi menciptakan fiscal gap yang dapat mengancam stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan

reformasi komprehensif dalam sistem pengelolaan Pajak Air Tanah, termasuk perbaikan database, penguatan kapasitas institusi, dan implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk mendukung tercapainya kinerja keuangan berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Tingkat efektivitas PAD mengalami penurunan dan tidak mencapai batas minimal 90%.
2. Jumlah realisasi PAD belum mencapai target.
3. realisasi penerimaan pajak air tanah mengalami penurunan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang?
2. Apakah ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber PAD yang potensial.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah.

Sebagai Bahan Evaluasi serta dasar dalam merumuskan kebijakan Pajak untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

3. Bagi Peneliti

Menambah Wawasan dan pemahaman penulis mengenai hubungan antara Penrimaan Pajak Daerah dengan Kinerja Keuangan secara Berkelanjutan

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah yang sama.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja Keuangan Berkelanjutan**

Menurut (Setiawan et al., 2025) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana dan diukur melalui indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut (Mangkona et al., 2023) menjelaskan kinerja keuangan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan yang dapat diketahui dari laporan keuangan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber dayanya. Sementara itu menurut (Mulyadi, 2023) mengartikan kinerja keuangan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran efektivitas dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan melalui laporan keuangan yang mencerminkan kesehatan dan pencapaian finansial perusahaan dalam periode tertentu. Perkembangan konsep kinerja keuangan kemudian melahirkan paradigma baru yang lebih komprehensif, yaitu kinerja keuangan berkelanjutan (*sustainable financial performance*), yang tidak hanya mengukur pencapaian target periode berjalan tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Menurut (Zhao et al., 2023), Kinerja keuangan berkelanjutan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan kinerja ekonomi sambil mencapai tujuan lingkungan dan sosial secara bersamaan. Kinerja Keuangan Berkelanjutan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Menurut (Halim & Kusufi, 2004), Kinerja Keuangan dapat diukur melalui efektivitas realisasi pendapatan, efisiensi pengelolaan anggaran, dan tingkat kemandirian fiskal. Hal ini menekankan bahwa Kinerja Keuangan yang berkelanjutan bukan hanya dilihat dari pencapaian target jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung pembangunan daerah secara terus menerus.

Dalam perspektif global, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD,2015) mendefinisikan keberlanjutan fiskal sebagai kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kebijakan fiskal jangka Panjang tanpa menimbulkan risiko krisis keuangan maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu, Brixi dan Shick (2002) menyatakan bahwa sustainable public finance berarti pemerintah mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya, termasuk dalam membiayai pelayanan publik, tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah di masa depan. Dengan demikian, Kinerja Keuangan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pencapaian target keuangan saat ini dengan kapasitas fiskal untuk mempertahankan kinerja di masa mendatang.

### 2.1.2 Indikator Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Kinerja Keuangan Berkelanjutan dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator utama. Menurut (Mahmudi, 2016), salah satu indikator penting adalah Rasio Kemandirian Fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengandalkan kemampuan keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pihak eksternal. Rasio kemandirian fiskal yang semakin tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga kinerja keuangan berkelanjutan dapat dikatakan semakin baik.

Kemandirian fiskal yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya.

Selain kemandirian fiskal, indikator lain yang tidak kalah penting adalah Rasio Ketergantungan Keuangan, yaitu perbandingan antara dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi dengan total pendapatan daerah. Rasio ketergantungan keuangan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah masih bergantung pada sumber dana eksternal untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya. Menurut (Mahmudi, 2016), rasio ketergantungan keuangan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang mengindikasikan rendahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya.

Sebaliknya, rasio ketergantungan yang rendah mencerminkan kinerja keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan, karena pemerintah daerah lebih mampu membiayai kebutuhan pembangunannya dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan berkelanjutan adalah Rasio Desentralisasi Fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio desentralisasi fiskal mengukur tingkat kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut (Mahmudi, 2016), rasio desentralisasi fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah tersebut berjalan dengan baik, yang berarti pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal, maka semakin besar pula kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan kemandirian dan keberlanjutan kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang. Rasio ini penting untuk menilai keberhasilan implementasi otonomi daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri dan berkelanjutan.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewenang untuk lebih menggali potensi daerahnya masing masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, berkaitan perimbangan keuangan daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan.

Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan aturan pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanaannya dipaksakan.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang secara sah sebagai pembayarannya pemakaian atas memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan dengan kata lain retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

## 3. Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih daerah berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang memiliki sifat dalam suatu kesatuan produksi, menambah pendapatan daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah.

## 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan yang bertujuan untuk menunjang dan menetapkan kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

## 2.3 Pajak Daerah

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang, bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung

kepada pembayar pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kesejahteraan rakyat (Mardiasmo,2016). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber pendapatan bagi negara maupun daerah, serta fungsi regulerend sebagai alat pengatur perekonomian dan perilaku masyarakat (Harjo,2013).

Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) kemudian memperbarui ketentuan mengenai jenis dan mekanisme pemungutan pajak daerah agar lebih sederhana dan terintegrasi.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini menjadi instrumen penting untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2014), semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta

dalam mendukung kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan.

### **2.3.1 Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan bahwa Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang ada di bawah permukaan tanah. Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah yang ditetapkan berdasarkan volume atau jumlah pengambilan, kualitas air, serta lokasi sumber air.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak daerah termasuk Pajak Air Tanah memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan (*budgetair function*) dan sebagai instrumen pengendalian (*regulerend function*). Dalam konteks *budgetair*, Pajak Air Tanah berfungsi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan dalam konteks *regulerend*, pajak ini berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah agar tidak berlebihan serta memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dengan demikian, Pajak Air Tanah tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan daerah, tetapi juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

### 2.3.2 Objek dan Pengecualian Pajak Air Tanah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan bahwa Objek dari Pajak Air Tanah (PAT) adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip polluter pays principle (PPP) yang dikemukakan oleh Pigou (1920), di mana masalah eksternal yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam harus ditransformasikan menjadi biaya internal bagi pihak yang memanfaatkannya. Dalam konteks air tanah, pemanfaatan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan kerusakan lingkungan.

Namun, terdapat beberapa objek yang dikecualikan atau tidak dikenai pajak air tanah, di antaranya:

1. Keperluan dasar rumah tangga
2. Pengairan pertanian rakyat
3. Perikanan rakyat
4. Peternakan rakyat
5. Keperluan keagamaan
6. Keperluan pemadam kebakaran
7. Keperluan Pemerintah, Pemerintah DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah

lainnya

Pengecualian ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana kebutuhan dasar masyarakat tidak dibebani dengan pajak lingkungan. Hal ini sesuai dengan temuan (Chien et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak lingkungan harus dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi emisi polutan dan mengoptimalkan

struktur energi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

Sebagai ilustrasi, apabila seseorang menggunakan air tanah untuk keperluan mandi atau mencuci dalam lingkup rumah tangga, aktivitas tersebut tidak dikenakan pajak karena termasuk dalam keperluan dasar yang dikecualikan. Namun, jika seseorang membuka usaha komersial seperti usaha cuci mobil atau industri yang menggunakan air tanah sebagai sumber utama, maka wajib membayarkan pajak air tanah. Perbedaan ini dimaksudkan agar pajak lingkungan tidak membebani konsumsi dasar masyarakat, tetapi tetap efektif dalam mengendalikan eksploitasi air tanah untuk kepentingan komersial.

### **2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah**

Subjek PAT adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib PAT adalah orang pribadi dan/atau badan yang berkewajiban membayar pajak tersebut. Identifikasi subjek dan wajib pajak ini penting dalam konteks penegakan regulasi lingkungan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menjelaskan bahwa regulasi lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi inovasi, menerapkan pengetahuan eksternal, dan mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan. Dalam konteks PAT, subjek pajak diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga mengadopsi praktik pengelolaan air yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pembedaan antara subjek dan wajib pajak juga memiliki implikasi hukum. Subjek pajak merujuk pada entitas yang melakukan aktivitas pemanfaatan air

tanah, sementara wajib pajak adalah pihak yang secara legal bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dalam beberapa kasus, keduanya dapat merujuk pada entitas yang sama, namun dalam situasi tertentu—misalnya dalam kontrak penyewaan lahan—subjek dan wajib pajak dapat berbeda.

#### **2.3.4 Penerapan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan Pajak Air Tanah dikenakan tarif sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Penetapan tarif ini merupakan hasil pertimbangan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Nilai perolehan air tanah dihitung dari hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah, yang mencakup biaya monitoring kualitas air, pengelolaan daerah resapan, dan upaya konservasi. Sementara itu, bobot air tanah ditentukan berdasarkan beberapa faktor kritis, yaitu:

1. Jenis sumber air: Air tanah dangkal atau dalam memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda
2. Lokasi sumber air: Wilayah dengan kelangkaan air memiliki bobot yang lebih tinggi
3. Lokasi pengambilan air: Jarak dari daerah resapan dan zona konservasi
4. Volume air yang diambil: Semakin besar volume, semakin tinggi dampak lingkungan

5. Kualitas air: Air dengan kualitas lebih baik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi
6. Tingkat kerusakan lingkungan: Dampak penurunan muka air tanah dan subsidensi

Pendekatan multi-faktor ini sejalan dengan temuan (Bashir et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak lingkungan harus dirancang untuk mencerminkan biaya eksternal dari pemanfaatan sumber daya alam, termasuk biaya pemeliharaan, pengendalian, dan dampak lingkungan jangka panjang.

Lebih lanjut, penerapan tarif 20% ini dimaksudkan untuk menciptakan efek insentif bagi pelaku usaha. Menurut (Zhao et al., 2023) pajak lingkungan yang tepat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi hijau, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mencapai win-win situation antara manfaat ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks PAT, tarif ini diharapkan dapat mendorong pengguna air tanah untuk:

1. Mengadopsi teknologi hemat air
2. Menggunakan sumber air alternatif seperti air hujan atau air daur ulang
3. Melakukan investasi pada sistem pengolahan air yang lebih efisien
4. Mengurangi pemborosan air dalam proses produksi

#### **2.4 Hubungan Antar Variabel**

Pajak daerah merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal suatu daerah. Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak Air

Tanah, sebagai salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD. Semakin besar penerimaan Pajak Air Tanah yang berhasil dipungut, maka semakin besar pula PAD yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Halim (2014), semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai pengeluarannya. Oleh karena itu, penerimaan Pajak Air Tanah yang optimal akan meningkatkan PAD, dan peningkatan PAD ini pada akhirnya berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, PAD dapat menjadi variabel perantara yang menjembatani pengaruh Pajak Air Tanah terhadap kinerja keuangan berkelanjutan.

Kinerja keuangan berkelanjutan menggambarkan kemampuan daerah dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal secara konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Halim dan Kusufi (2014), kinerja keuangan dapat dinilai melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. Dalam perspektif global, OECD (2015) menekankan bahwa keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) adalah kemampuan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang tanpa menimbulkan risiko krisis. Dengan demikian, penerimaan Pajak Air Tanah yang meningkat, baik secara langsung maupun melalui kontribusinya terhadap PAD, akan memperkuat kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama                     | Judul Penelitian                                                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dea Juliana S            | Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.                        | Pajak hotel secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hotel dan Pajak restoran secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | Herdiyani                | Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sleman                                  | Pajak hotel memiliki arah positif namun tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pajak restoran memiliki arah positif namun tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah serta variabel pajak air tanah memiliki arah positif tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari pengujian simultan dari variabel pajak hotel, restoran dan air tanah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.                                         |
| 3  | Siti Hardiningtya Yasmin | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan                                       | Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.                                                                                                                                           |
| 4  | Kiki Clarisya Widyawati  | Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah (Sebelum Dan Pada Saat Pandemi COVID-19) | Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan negative terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, tidak terdapat perbedaan signifikan yang terjadi terhadap Pajak dan Retribusi Daerah sebelum dan pada saat pandemic COVID-19. Namun, diketahui terdapat perbedaan yang signifikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan pada saat pandemic COVID-19. |

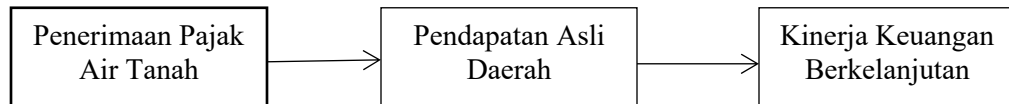
## 2.5 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu Pajak Air Tanah (X), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Z), dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y). Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi penerimaan Pajak Air Tanah, maka semakin besar pula sumbangan PAD bagi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2016) yang menyatakan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

PAD sendiri mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Halim (2014) menegaskan bahwa semakin besar PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, Pajak Air Tanah dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PAD. Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan, sehingga dapat memperkuat kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Kinerja keuangan berkelanjutan dalam penelitian ini diukur melalui efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal (Halim & Kusufi, 2014). Dalam perspektif OECD (2015), keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) merupakan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kerangka pemikiran

penelitian ini mengasumsikan bahwa Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap kinerja keuangan berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui PAD sebagai variabel intervening.



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual**

## **2.6 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.
2. Ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena berfokus pada data numerik berupa laporan keuangan daerah yang kemudian dianalisis dengan alat. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif bertujuan menguji hipotesis melalui pengolahan data angka secara objektif. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak air tanah (variabel X) terhadap kinerja keuangan berkelanjutan (variabel Y) melalui pendapatan asli daerah (PAD) sebagai intervening (Z).

Pendekatan yang digunakan adalah Asosiatif Kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variable. Dalam penelitian ini, Pajak Air Tanah (X) diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Z) dan selanjutnya memengaruhi Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y), baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai konsep-konsep yang diteliti agar dapat diukur secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama, yaitu: **variabel independen (X), variabel intervening (Z), dan variabel dependen (Y).**

### **1. Penerimaan Pajak Air Tanah (X)**

Penerimaan pajak air tanah merupakan jumlah pajak yang diterima pemerintah dari pemanfaatn air tanah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Variabel ini diukur melalui beberapa indokator, yaitu realisasi penerimaan pajak air tanah, tingkat efektivitas pemungutan pajak air tanah dan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak air tanah (Asmandani & Wicaksono, 2022). Skala pengukuran yang digunakan adalah Rasio.

### **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Z)**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain. Dalam penelitian ini, PAD diperlakukan sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara penerimaan pajak air tanah dan kinerja keuangan daerah. Indikator pengukuran meliputi realisasi PAD, tingkat pertumbuhan PAD dan rasio efektivitas PAD. Skala pengukuran adalah Rasio.

### **3. Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y)**

Kinerja keuangan berkelanjutan merupakan ukuran kemampuan daerah dalam mengelola anggaran daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ariska & Shinta, 2025). Indikator pengukuran mencakup rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan keuangan dan rasio ketergantungan desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio.

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional**

| Variabel                           | Definisi Operasional                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                          | Skala |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Penerimaan Pajak Air Tanah (X)     | Jumlah pajak yang diterima dari pengambilan/pemanfaatan air tanah sesuai peraturan daerah                                                                         | 1. Realisasi penerimaan pajak air tanah<br>2. Tingkat efektivitas pemungutan pajak air tanah<br>3. Tingkat Pertumbuhan penerimaan pajak air tanah<br>(Asmandani & Wicaksono, 2022) | Rasio |
| Pendapatan Asli Daerah (Z)         | Pendapatan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, retribusi, dan lainnya.                                                         | 1. Realisasi PAD<br>2. Tingkat Pertumbuhan PAD<br>3. Rasio Efektivitas PAD<br>(Halim, 2014)                                                                                        | Rasio |
| Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y) | Ukuran kemampuan daerah dalam mengelola anggaran daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | 1. Rasio kemandirian fiskal<br>2. Rasio ketergantungan keuangan<br>3. Rasio desentralisasi fiskal<br>(Mahmudi, 2016)                                                               | Rasio |

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang, karena instansi tersebut berwenang dalam pengelolaan Pajak Air Tanah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada ketersediaan data yang relevan dengan penelitian.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah, PAD, dan Laporan Kinerja Keuangan daerah periode 2021-2023.

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

| Jadwal Kegiatan       | April |   |   |   | Mei |   |   |   | Juni |   |   |   | Juli |   |   |   | Agustus |   |   |   | September |   |   |   | Oktober |   |   |   | November |   |   |   |
|-----------------------|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
|                       | 1     | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| Jadwal Kegiatan       |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| Pengajuan Judul       |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| Pembuatan Tugas akhir |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| Bimbingan Tugas akhir |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| Seminar Tugas akhir   |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| Pengumpulan Data      |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| Bimbingan Tugas akhir |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| Sidang MejaHijau      |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Laporan Keuangan bulanan daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kinerja Keuangan. Populasi mencakup data bulanan dari tahun 2021 hingga 2023, sehingga total populasi adalah 36 bulan pengamatan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi bulanan Penerimaan Pajak Air Tanah, Realisasi PAD bulanan, serta Laporan Keuangan Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang periode Januari 2021 hingga Desember 2023, dengan total 36 observasi data bulanan.

Pemilihan periode tiga tahun (2021-2023) didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Periode Pasca Pandemi COVID-19 : Tahun 2021 dipilih sebagai tahun awal karena merupakan fase pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, sehingga dapat mengamati pola penerimaan pajak daerah dalam kondisi ekonomi yang mulai pulih dan stabil.
2. Ketersediaan Data Terkini: Data tahun 2021-2023 merupakan data terbaru dan paling relevan yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada saat penelitian dilakukan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah, Laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta laporan kiberja keuangandaerah Kabputaen Deli Serdang.

Data diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi yang berwenang, serta dokumen publik lain yang relevan dengan penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian menggunakan data historis yang sudah tersedia dan dapat diakses secara resmi.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode statistik.

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dipastikan bahwa data memenuhi asumsi klasik, yaitu:

### 1) Uji Normalitas

Dalam Uji Normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variable independent dan variable dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan normal P-Plot. Suatu variable dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik titik data searah mengikuti garis diagonal. Tes Kolmogorov-Smirnov adalah instrument analisis yang digunakan dalam tes ini. Syarat dalam uji ini adalah:

- a. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 (Sig <0,05), maka distribusi residul data tidak normal
- b. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Sig > 0.05), maka distribusi residual data normal.

### 2) Uji Multikolinearitas

Dalam Uji Multikolonearitas digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Uji Multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan Variance Inflating Factor (VIF). Batas dari VIF aadalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Dengan Uji Asumsi:

- a. Jika nilai VIF > dari 10 dan nilai tolerance value < 0,1 maka terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF < dari 10 dan nilai tolerance value < 0,1 maka tidak

terjadi multikolinearitas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Dalam Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatter-Plot.

### 4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antara error (residual) pada periode sekarang dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mengalami autokorelasi, sehingga residual bersifat acak. Uji yang digunakan adalah Durbin -Watson (DW Test) dengan kriteria:

- a. Nilai DW mendekati 2 = tidak ada autokorelasi.
- b. Nilai DW < 2 = terdapat autokorelasi positif.
- c. Nilai DW > 2 = terdapat autokorelasi negative.

Dengan demikian, jika nilai DW hasil perhitungan berada di sekitar angka 2, maka model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen ( $X$  = Penerimaan Pajak Air Tanah) **terhadap** variabel dependen ( $Y$  = Kinerja Keuangan Berkelanjutan), baik secara langsung maupun melalui variabel intervening ( $Z$  = PAD). Model regresi yang digunakan adalah:

- **Model 1 (Pengaruh X terhadap Z):**

$$Z = \alpha_1 + \beta_1 X + e_1$$

- **Model 2 (Pengaruh X dan Z terhadap Y):**

$$Y = \alpha_2 + \beta_2 X + \beta_3 Z + e_2$$

Keterangan:

- $ZZZ$  = Pendapatan Asli Daerah
- $YYY$  = Kinerja Keuangan Berkelanjutan
- $XXX$  = Penerimaan Pajak Air Tanah
- $\alpha$  = konstanta
- $\beta$  = koefisien regresi
- $e$  = error

### 3. Uji Sobel (Mediation Test)

Untuk menguji apakah PAD (Z) benar-benar berperan sebagai variabel mediasi antara penerimaan pajak air tanah (X) dan kinerja keuangan berkelanjutan (Y), digunakan Uji Sobel.

Rumus Sobel:

$$z = \frac{a \times b}{\sqrt{(b^2 \times S_a^2) + (a^2 \times S_b^2)}}$$

Keterangan:

- $aaa$  = koefisien regresi X terhadap Z
- $bbb$  = koefisien regresi Z terhadap Y
- $S_a$  = standar error koefisien a
- $S_b$  = standar error koefisien b

- Nilai Z dibandingkan dengan nilai kritis 1,96 (taraf signifikansi 5%). Jika  $Z > 1,96$ , maka mediasi signifikan.

#### 4. Uji Hipotesis

- **Uji t (parsial):** untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Rumus t-hitung:

$$t = \beta SE(\beta)$$

dengan keputusan: jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis diterima.

- **Uji F (simultan):** untuk melihat pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Rumus F-hitung:

$$F = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

dengan keputusan: jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka model regresi signifikan.

- **Koefisien Determinasi ( $R^2$ ):** digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang yang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Bapenda memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Objek penelitian yang digunakan adalah data realisasi penerimaan Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan indikator Kinerja Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023. Pemilihan periode tiga tahun ini didasarkan pada ketersediaan data terkini, kelengkapan laporan keuangan yang telah diaudit dan pasca pandemi.

##### **4.1.2 Karakteristik Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023
2. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2021-2023

### 3. Laporan Kinerja Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023

Data yang dikumpulkan berupa data bulanan selama periode penelitian, sehingga diperoleh 36 observasi (3 tahun × 12 bulan). Penggunaan data bulanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai pola dan tren penerimaan pajak serta kinerja keuangan berkelanjutan.

#### 4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

##### 4.1.3.1 Penerimaan Pajak Air Tanah (X)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023, realisasi penerimaan Pajak Air Tanah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berikut data variabel Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2021-2023 :

**Tabel 4. 1 Penerimaan Pajak Air Tanah 2021-2023 (dalam Rupiah)**

| Bulan     | 2021        | 2022          | 2023          |
|-----------|-------------|---------------|---------------|
| Januari   | 448,718,089 | 469,463,942   | 1,083,406,914 |
| Februari  | 587,629,051 | 516,412,118   | 991,259,688   |
| Maret     | 514,059,524 | 714,264,914   | 986,761,835   |
| April     | 543,653,959 | 2,176,494,290 | 742,103,344   |
| Mei       | 449,607,206 | 3,256,933,130 | 1,109,914,706 |
| Juni      | 624,639,774 | 3,176,845,959 | 771,170,629   |
| Juli      | 440,523,007 | 2,141,156,439 | 861,441,466   |
| Agustus   | 359,057,361 | 2,170,577,492 | 1,002,406,731 |
| September | 677,423,942 | 1,665,627,744 | 609,495,273   |
| Oktober   | 542,877,458 | 3,672,398,881 | 780,091,116   |
| November  | 732,843,225 | 784,568,651   | 459,814,425   |
| Desember  | 469,418,248 | 1,383,625,861 | 1,181,650,783 |

Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa, pada tahun 2021 total realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp 6 miliar dari target Rp 19

miliar atau hanya mencapai 31,5%. Tahun 2022 mengalami peningkatan drastis dengan realisasi mencapai Rp 22,1 miliar dari target Rp 44,59 miliar atau 49,5%, yang menunjukkan pencapaian melebihi target. Namun pada tahun 2023, realisasi kembali menurun menjadi Rp 10,5 miliar dari target Rp 25,28 miliar atau hanya 41,5%.

Volatilitas ini mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam sistem pemungutan dan pengelolaan Pajak Air Tanah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, fluktuasi aktivitas usaha yang menggunakan air tanah, atau lemahnya sistem monitoring dan evaluasi.

#### 4.1.3.2 Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Z)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2021-2023 menunjukkan tren peningkatan nominal namun dengan tingkat efektivitas yang belum optimal. Berikut data variabel Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2023 :

**Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah 2021-2023 (dalam Rupiah)**

| Bulan     | 2021           | 2022            | 2023            |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| Januari   | 60,198,954,344 | 67,712,623,562  | 68,205,908,662  |
| Februari  | 62,977,367,622 | 70,837,821,572  | 71,353,873,677  |
| Maret     | 66,681,918,659 | 75,004,752,253  | 75,551,160,364  |
| April     | 72,238,745,213 | 81,255,148,274  | 81,847,090,394  |
| Mei       | 75,017,158,491 | 84,380,346,285  | 84,995,055,409  |
| Juni      | 78,721,709,528 | 88,547,276,966  | 89,192,342,096  |
| Juli      | 81,500,122,805 | 91,672,474,976  | 92,340,307,111  |
| Agustus   | 83,352,398,323 | 93,755,940,316  | 94,438,950,455  |
| September | 85,204,673,842 | 95,839,405,657  | 96,537,593,798  |
| Oktober   | 87,983,087,119 | 98,964,603,667  | 99,685,558,813  |
| November  | 90,761,500,397 | 102,089,801,678 | 102,833,523,828 |
| Desember  | 81,500,122,810 | 91,672,474,982  | 92,340,307,116  |

Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa, tahun 2021 mencatat realisasi PAD sebesar Rp 926 miliar dari target Rp 1.501 triliun (61,6%), tahun 2022 meningkat menjadi Rp 1.041 triliun dari target Rp 1.504 triliun (69,2%), dan tahun 2023 mencapai Rp 1,049 triliun dari target Rp 1.591 triliun (65,9%).

Meskipun terdapat peningkatan realisasi dari tahun ke tahun, namun tingkat efektivitas PAD masih jauh di bawah standar optimal minimal 90% yang ditetapkan oleh (Halim & Kusufi, 2014). Data bulanan juga menunjukkan fluktuasi yang konsisten sepanjang periode pengamatan, dengan pola penurunan drastis yang terjadi pada bulan Desember setiap tahunnya.

#### **4.1.3.3 Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y)**

Kinerja Keuangan Berkelanjutan dalam penelitian ini diukur menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Pemilihan indikator ini didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, rasio desentralisasi fiskal mampu mengukur tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah (Mahmudi, 2016). Kedua, indikator ini memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian yang menganalisis kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah. Ketiga, data yang dibutuhkan untuk perhitungan (PAD dan Total

Pendapatan Daerah) tersedia secara lengkap dan konsisten dalam laporan keuangan bulanan Kinerja Keuangan Berkelanjutan tahun 2021-2023 :

**Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Berkelanjutan Melalui Rasio Desentralisasi Fiskal Bapenda Periode 2021-2023**

| <b>Bulan</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Januari      | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| Februari     | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| Maret        | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| April        | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| Mei          | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| Juni         | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| Juli         | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| Agustus      | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| September    | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| Oktober      | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| November     | 26.17       | 27.92       | 27.23       |
| Desember     | 26.17       | 27.92       | 27.23       |

Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa, data laporan keuangan periode 2021-2023, Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kondisi yang masih rendah. Pada tahun 2021, rata-rata rasio desentralisasi fiskal berkisar 26,17%, meningkat menjadi 27,92% pada tahun 2022, kemudian menurun sedikit menjadi 27,23% pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, angka-angka ini masih jauh dari standar optimal yang mengindikasikan kemandirian fiskal yang kuat.

Menurut (Mahmudi, 2016), rasio desentralisasi fiskal yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri, sehingga semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka

semakin baik pula kinerja keuangan berkelanjutan daerah tersebut. Kondisi Kabupaten Deli Serdang yang menunjukkan rasio masih di bawah 70% mengindikasikan bahwa daerah masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan memerlukan upaya optimalisasi PAD termasuk dari sektor Pajak Air Tanah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mewujudkan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan data dari tahun 2021 – 2023 yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Tujuan statistik deskriptif ini untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang didasarkan pada nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak air tanah (X), variabel intervening adalah pendapatan asli daerah (Z), sedangkan kinerja keuangan berkelanjutan (Y) sebagai variabel dependen. Berikut adalah statistik deskriptif untuk masing-masing variabel :

**Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

| Descriptive Statistics         |    |             |              |             |                |
|--------------------------------|----|-------------|--------------|-------------|----------------|
|                                | N  | Minimum     | Maximum      | Mean        | Std. Deviation |
| Penerimaan Pajak Air Tanah     | 36 | 359,057,361 | 3672398881   | 1086064922  | 852435626.0    |
| Pendapatan Asli Daerah         | 36 | 60198954344 | 102833523... | 83810891696 | 11465882534    |
| Kinerja Keuangan Berkelanjutan | 36 | 26.17       | 27.92        | 27.1067     | .72995         |
| Valid N (listwise)             | 36 |             |              |             |                |

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai N menunjukkan banyaknya data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebanyak 36 data sampel yang diperoleh dari penerimaan pajak air tanah, pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan berkelanjutan selama jangka waktu 3 tahun periode 2021-2023.

1. Penerimaan pajak air tanah menunjukkan jumlah sampel sebanyak 36 data dengan nilai minimum 359,057,361 dan nilai maksimum sebesar 3,672,398,881 dengan rata rata penerimaan pajak air tanah adalah sebesar 1,086,064,922 dan standar deviasi sebesar 852,435,626.
2. Pendapatan asli daerah menunjukkan jumlah sampel sebanyak 36 data dengan nilai minimum 60,198,954,344 dan nilai maksimum sebesar 102,833,523... dengan rata rata pendapatan asli daerah adalah sebesar 83,810,891,696 dan standar deviasi sebesar 11,465,882,534.
3. Kinerja keuangan berkelanjutan menunjukkan jumlah sampel sebanyak 36 data dengan nilai minimum 26.17 dan nilai maksimum sebesar 27.92 dengan rata rata kinerja keuangan berkelanjutan sebesar 27.1067 dan standar deviasi sebesar 0,72995.

## 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik digunakan untuk memastikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gangguan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi sebelum nantinya menggunakan uji hipotesis.

### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (KS) test. Jika signifikan  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal. Jika signifikan  $> 0,05$  maka data dianggap berdistribusi normal (Irfan et., al, 2024).

**Tabel 4. 5 Uji Normalitas Model 1**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test       |                         | Unstandardized Residual |      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| N                                        |                         | 36                      |      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>         | Mean                    | .0000059                |      |
|                                          | Std. Deviation          | 1.08027E+10             |      |
| Most Extreme Differences                 | Absolute                | .079                    |      |
|                                          | Positive                | .079                    |      |
|                                          | Negative                | -.075                   |      |
| Test Statistic                           |                         | .079                    |      |
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>      |                         | .200 <sup>d</sup>       |      |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup> | Sig.                    | .830                    |      |
|                                          | 99% Confidence Interval | Lower Bound             | .820 |
|                                          |                         | Upper Bound             | .839 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan tabel pengolahan data diatas, diperoleh nilai besarnya Kolmogrov Smirnov (KS) sebesar 0,079 pada signifikan 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dikarenakan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4. 6 Tabel Uji Normalitas Model 2**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test       |                         | Unstandardized Residual |      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| N                                        |                         | 36                      |      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>         | Mean                    | .0000000                |      |
|                                          | Std. Deviation          | .56274548               |      |
| Most Extreme Differences                 | Absolute                | .122                    |      |
|                                          | Positive                | .122                    |      |
|                                          | Negative                | -.081                   |      |
| Test Statistic                           |                         | .122                    |      |
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>      |                         | .192                    |      |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup> | Sig.                    | .184                    |      |
|                                          | 99% Confidence Interval | Lower Bound             | .174 |
|                                          |                         | Upper Bound             | .194 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan tabel pengolahan data diatas, diperoleh nilai besarnya Kolmogrov Smirnov (KS) sebesar 0,122 pada signifikan 0,192. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dikarenakan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Irfan et., al, 2024), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linier (multikolinearitas) dalam regresi, perlu dipertimbangkan besaran nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan juga nilai toleransi.

1. Nilai Tolerance :

- a. Jika nilai Tolerance  $> 0,10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
- b. Jika nilai Tolerance  $< 0,10$ , maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

2. Nilai VIF:

- a. Jika nilai VIF  $< 10,00$ , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
- b. Jika nilai VIF  $> 10,00$ , maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

**Tabel 4. 7 Uji Multikolineritas Model 1**

| Model |                            | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |       | Collinearity Statistics |       |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|
|       |                            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  | Tolerance               | VIF   |
|       | B                          | Std. Error                  | Beta       |                           |        |       |                         |       |
| 1     | (Constant)                 | 7.891E+10                   | 2984712802 |                           | 26.440 | <.001 |                         |       |
|       | Penerimaan Pajak Air Tanah | 4.508                       | 2.173      | .335                      | 2.074  | .046  | 1.000                   | 1.000 |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan data tabel diatas, nilai tolerance penerimaan pajak air tanah adalah sebesar 1,000 Adapun nilai VIF dari penerimaan pajak air tanah adalah sebesar 1,000. Dari variabel tersebut nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas variabel bebas dalam penelitian ini.

**Tabel 4. 8 Uji Multikolineritas Model 2**

|       |                            | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |        | Collinearity Statistics |       |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|--------|-------------------------|-------|
| Model |                            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.   | Tolerance               | VIF   |
|       |                            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |        |                         |       |
| 1     | (Constant)                 | 25.588                      | .733       |                           | 34.917 | <.,001 |                         |       |
|       | Penerimaan Pajak Air Tanah | 4.693E-10                   | .000       | .548                      | 3.848  | <.,001 | .888                    | 1.127 |
|       | Pendapatan Asli Daerah     | 1.204E-11                   | .000       | .189                      | 1.328  | .193   | .888                    | 1.127 |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

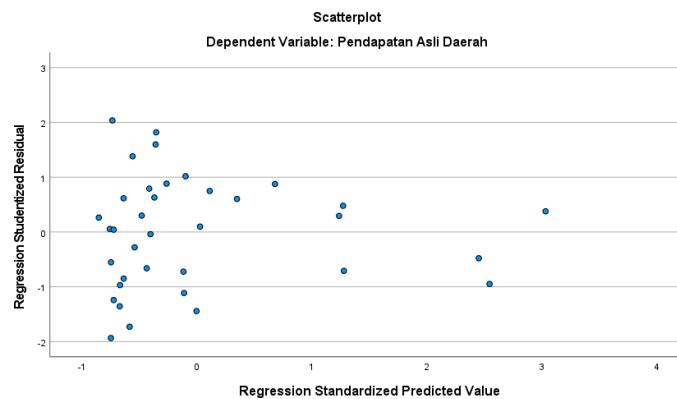
Berdasarkan data tabel diatas, nilai tolerance penerimaan pajak air tanah adalah sebesar 0,888 Adapun nilai VIF dari penerimaan pajak air tanah adalah sebesar 1,127. Nilai tolerance pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,888 Adapun nilai VIF dari penerimaan pajak air tanah adalah sebesar 1,127. Dari variabel tersebut nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolineritas variabel bebas dan variabel intervening dalam penelitian ini.

#### 4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memverifikasi apakah dalam model regresi ada ketidaksetaraan dalam varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain yang dapat dilihat melalui grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya (Irfan et., al, 2024). Dasar yang digunakan untuk menentukan heretoskedastisitas antara lain :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas Model 1**

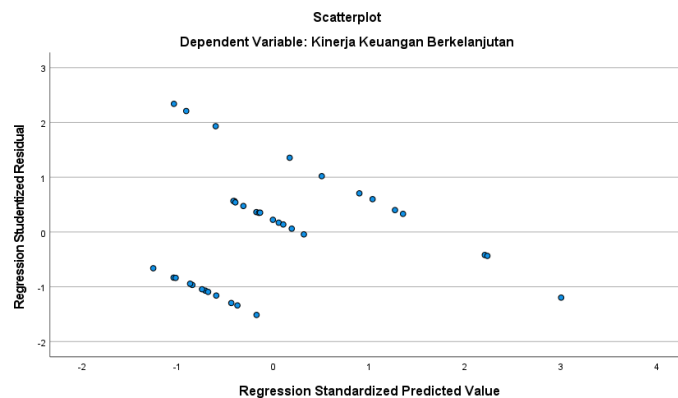


Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.1 menggunakan scatterplot pada Model 1, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Regression Studentized Residual) tanpa membentuk pola tertentu yang jelas. Penyebaran titik-titik tidak menunjukkan pola seperti mengumpul, melebar, atau menyempit, serta tidak membentuk pola gelombang atau corong. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian, model regresi layak

digunakan untuk prediksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan variabel independen yang digunakan.

**Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas Model 2**



Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.2 menggunakan scatterplot pada Model 2, terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang sistematis. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa adanya pola mengumpul, melebar, menyempit, atau membentuk pola khusus lainnya. Penyebaran yang acak ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, maka model regresi ini dapat diandalkan untuk memprediksi Kinerja Keuangan Berkelanjutan dan memenuhi salah satu syarat analisis regresi linear berganda yang baik.

#### 4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Irfan et., al, 2024), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi yang dapat di deteksi melalui dengan nilai Durbin Watson.

1. Jika  $0 < d < dL$ , berarti ada autokorelasi positif.
2. Jika  $4 - dL < d < 4$ , berarti ada auto korelasi negatif.
3. Jika  $2 < d < 4 - dua$  atau  $dua < d < 2$ , berarti tidak ada auto korelasi positif atau negatif.
4. Jika  $dL \leq d \leq dU$  atau  $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ , pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data.
5. Jika nilai  $du < d < 4-du$  maka tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi Model 1**

| <b>Model Summary<sup>b</sup></b> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                            | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                                | .904 <sup>a</sup> | .818     | .807              | .31763                     | 1.904         |

a. Predictors: (Constant), LAG\_Y, Penerimaan Pajak Air Tanah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai perolehan *Durbin Watson* (DW) adalah sebesar 1.904. Maka dapat

disimpulkan bahwa dari angka *Durbin Watson* itu tidak terjadi autokorelasi karena  $dU < dW < 4 - dU$  ( $1.5872 < 1.904 < 2.4128$ ).

**Tabel 4. 10 Uji Autokorelasi Model 2**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .905 <sup>a</sup> | .819     | .801              | .32208                     | 1.918         |

a. Predictors: (Constant), LAG\_Y, Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Air Tanah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai perolehan *Durbin Watson* (DW) adalah sebesar 1.918. Maka dapat disimpulkan bahwa dari angka *Durbin Watson* itu tidak terjadi autokorelasi karena  $dU < dW < 4 - dU$  ( $1.5872 < 1.918 < 2.4128$ ).

#### 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Dari uji asumsi klasik di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dan tidak terdapat gejala multikolinieritas, dan heteroskedastisitas sehingga memenuhi syarat untuk melakukan analisis regresi linier berganda agar dapat melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian ini menganalisis pengaruh penerimaan pajak air tanah terhadap kinerja keuangan berkelanjutan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (studi badan pendapatan daerah Deli Serdang) periode 2021-2023. Hasil persamaan regresi :

**Tabel 4. 11 Hasil Analisis Linier Berganda Model 1**

| <b>Coefficients<sup>a</sup></b> |            |                             |            |                           |         |        |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|
| Model                           |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t       | Sig.   |
|                                 |            | B                           | Std. Error | Beta                      |         |        |
| 1                               | (Constant) | 26.538                      | .160       |                           | 166.298 | <.,001 |
|                                 | X_PPAT     | 5.236E-10                   | .000       | .611                      | 4.506   | <.,001 |

a. Dependent Variable: Y\_KKB

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

$$Y = 26.538 + 5.236E-10 X_1 + e$$

1. Konstanta (*a*)

Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar 26.538 bernilai positif yang berarti jika variabel Penerimaan pajak air tanah tidak terjadi perubahan, maka Kinerja Keuangan Berkelanjutan akan bernilai sebesar 26.538.

2. Penerimaan Pajak Air Tanah ( $\beta_1$ )

Koefisien regresi pada variabel Penerimaan Pajak Air Tanah sebesar 5.236E-10. Hal ini menunjukkan setiap terjadi peningkatan variabel Penerimaan Pajak Air Tanah sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kinerja Keuangan Berkelanjutan sebesar 5.236E-10.

**Tabel 4. 12 Hasil Analisis Linier Berganda Model 2**

| <b>Coefficients<sup>a</sup></b> |            |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                           |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                                 |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                               | (Constant) | -3.286E+10                  | 8.424E+10  |                           | -.390 | .699 |
|                                 | X_PPAT     | 2.303                       | 2.716      | .171                      | .848  | .403 |
|                                 | Y_KKB      | 4211720949                  | 3172222607 | .268                      | 1.328 | .193 |

a. Dependent Variable: Z\_PAD

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

$$Z = -3.286E+10 + 2.303 X_1 + 421,172,094.9 Y + e$$

1. Konstanta ( $a$ )

Nilai konstanta sebesar  $-3.286E+10$  menunjukkan bahwa apabila variabel Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan bernilai nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar  $-3.286E+10$ . Konstanta ini merepresentasikan nilai dasar Pendapatan Asli Daerah sebelum dipengaruhi oleh variabel independen dalam model.

2. Penerimaan Pajak Air Tanah ( $\beta_1$ )

Variabel Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 2.303. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan Penerimaan Pajak Air Tanah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.303 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Kinerja Keuangan Berkelanjutan ( $\beta_2$ )

Variabel Kinerja Keuangan Berkelanjutan memiliki koefisien regresi sebesar 4,211,720,949. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan Kinerja Keuangan Berkelanjutan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,211,720,949 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam analisis regresi linear berganda terdiri dari dua jenis pengujian, yaitu uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen

secara individual terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam kedua uji ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat alpha 0.05, dimana jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan (Irfan et., al, 2024).

### a. Hasil Uji Pengaruh Langsung

#### 1. (Uji t)

**Tabel 4. 13 Hasil Uji t Model 1**

|       |            | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |         |      |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
|       |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |         |      |
| Model |            | B                           | Std. Error | Beta                      | t       | Sig. |
| 1     | (Constant) | 26.538                      | .160       |                           | 166.298 | .000 |
|       | X_PPAT     | 5.236E-10                   | .000       | .611                      | 4.506   | .000 |

a. Dependent Variable: Y\_KKB

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13, variabel Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 5.236E-10 dengan nilai t hitung sebesar 4.506 dan nilai signifikansi 0.000 ( $< 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan secara parsial. Konstanta sebesar 26.538 dengan nilai signifikansi 0.000 juga menunjukkan bahwa konstanta memiliki pengaruh yang signifikan dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Air

Tanah secara individual memiliki pengaruh yang nyata dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan.

## 2. (Uji f)

**Tabel 4. 14 Hasil Uji f Model 1**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                    |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|--------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.               |
| 1                  | Regression | 6.973          | 1  | 6.973       | 20.305 | <,001 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 11.676         | 34 | .343        |        |                    |
|                    | Total      | 18.649         | 35 |             |        |                    |

a. Dependent Variable: Y\_KKB

b. Predictors: (Constant), X\_PPAT

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.14, diperoleh nilai F hitung sebesar 20.305 dengan nilai signifikansi  $< 0.001$  ( $< 0.05$ ). Nilai Sum of Squares untuk Regression adalah 6.973 dan Residual sebesar 11.676, dengan Total Sum of Squares 18.649. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang terbentuk layak (fit) dan variabel independen Penerimaan Pajak Air Tanah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi Kinerja Keuangan Berkelanjutan berdasarkan variabel Penerimaan Pajak Air Tanah.

## b. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung

### 1. (Uji t)

**Tabel 4. 15 Hasil Uji t Model 2**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant) | -3.286E+10                  | 8.424E+10  |                           | -.390 | .699 |
|                           | X_PPAT     | 2.303                       | 2.716      | .171                      | .848  | .403 |
|                           | Y_KKB      | 4211720949                  | 3172222607 | .268                      | 1.328 | .193 |

a. Dependent Variable: Z\_PAD

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 2.303 dengan nilai signifikansi 0.403 ( $> 0.05$ ), sedangkan Kinerja Keuangan Berkelanjutan memiliki koefisien sebesar 4,211,720,949 dengan nilai signifikansi 0.193 ( $> 0.05$ ). Kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai signifikansi keduanya lebih besar dari 0.05. Konstanta sebesar -3.286E+10 juga menunjukkan nilai signifikansi 0.699 ( $> 0.05$ ), yang berarti tidak signifikan.

## 2. (Uji f)

**Tabel 4. 16 Hasil Uji f Model 2**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |       |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1                  | Regression | 7.240E+20      | 2  | 3.620E+20   | 3.081 | .059 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 3.877E+21      | 33 | 1.175E+20   |       |                   |
|                    | Total      | 4.601E+21      | 35 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: Z\_PAD

b. Predictors: (Constant), Y\_KKB, X\_PPAT

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.16, nilai F hitung sebesar 3.081 dengan nilai signifikansi 0.059 ( $> 0.05$ ) menunjukkan bahwa secara simultan variabel Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun nilai Sum of Squares Regression sebesar 7.240E+20 cukup besar, namun model ini tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, model regresi ini kurang layak untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan variabel Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan.

### c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam analisis regresi linear

berganda, Adjusted R Square lebih sering digunakan karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel, sehingga memberikan estimasi yang lebih akurat dibandingkan R Square biasa (Irfan et., al, 2024).

**Tabel 4. 17 Hasil Uji Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

| <b>Model Summary<sup>b</sup></b> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                            | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                                | .637 <sup>a</sup> | .406     | .370              | .57955                     |

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Air Tanah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.17, diperoleh nilai R sebesar 0.637 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel independen (Konstanta, Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Air Tanah) dengan variabel dependen (Kinerja Keuangan Berkelanjutan). Nilai R Square sebesar 0.406 menunjukkan bahwa 40.6% variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 59.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0.370 mengindikasikan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan ukuran sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan adalah sebesar 37%. Standar Error of the Estimate sebesar 0.57955 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil, yang

berarti model cukup akurat dalam memprediksi nilai Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Secara keseluruhan, model ini memiliki kemampuan moderat dalam menjelaskan variabel dependen.

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023, ditemukan bahwa instansi ini belum menerapkan pengukuran Kinerja Keuangan Berkelanjutan (KKB) secara komprehensif sebagaimana yang direkomendasikan oleh (Mahmudi, 2016). Pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan masih bersifat konvensional, yaitu hanya fokus pada realisasi target penerimaan pajak dan retribusi daerah, tingkat efektivitas pemungutan pajak, serta kontribusi nominal setiap jenis pajak terhadap total PAD. Pendekatan konvensional ini memiliki keterbatasan mendasar karena hanya berorientasi jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal jangka panjang, sehingga Bapenda cenderung fokus pada pencapaian target tahunan tanpa memperhatikan apakah pola penerimaan dapat dipertahankan secara konsisten di masa mendatang.

Volatilitas penerimaan Pajak Air Tanah yang berfluktuasi dari 31.5% di tahun 2021, melonjak menjadi 49.5% di tahun 2022, kemudian turun menjadi 41.5% di tahun 2023, tidak dapat terdeteksi sebagai masalah sistemik karena ketiadaan indikator stabilitas dan predictability dalam sistem pengukuran yang ada. Menurut (Bird & Zolt, 2005), efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi dan predictability

dalam proses pemungutan, dimana fluktuasi ekstrem mengindikasikan lemahnya infrastruktur administrasi pajak dan sistem monitoring yang tidak terstandarisasi. Ketiadaan pengukuran KKB ini menyebabkan Bapenda kesulitan dalam merumuskan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengidentifikasi sumber-sumber ketidakstabilan dalam penerimaan pajak, mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan terhadap keberlanjutan fiskal daerah, serta membandingkan kinerja keuangan daerah dengan standar optimal yang seharusnya dicapai.

Jika Bapenda Kabupaten Deli Serdang menerapkan pengukuran Kinerja Keuangan Berkelanjutan secara sistematis, beberapa dampak positif dapat diperoleh antara lain peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap masalah fiskal melalui indikator seperti Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan, dan Rasio Desentralisasi Fiskal yang memungkinkan volatilitas Pajak Air Tanah langsung terdeteksi sebagai ancaman sehingga manajemen dapat mengambil tindakan korektif lebih awal. Pendapat (Mahmudi, 2016), menekankan bahwa sistem peringatan dini dalam pengelolaan keuangan daerah hanya dapat berfungsi optimal jika didukung oleh indikator-indikator yang mampu menangkap aspek keberlanjutan, bukan hanya pencapaian target jangka pendek. Selain itu, pengukuran KKB memungkinkan perumusan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan target jangka panjang seperti "Meningkatkan Rasio Desentralisasi Fiskal dari 27.23% menjadi 35% dalam 5 tahun" yang lebih strategis dibandingkan target konvensional berbasis rupiah, peningkatan akuntabilitas

dan transparansi sesuai prinsip good governance (Halim & Kusufi, 2014), kemudahan dalam benchmarking dengan daerah lain, serta kredibilitas dokumen perencanaan yang lebih baik.

Sebaliknya, jika Bapenda tetap menggunakan pendekatan konvensional tanpa mengadopsi pengukuran KKB, beberapa dampak negatif dapat terjadi. Pertama, ketidakmampuan mengantisipasi krisis fiskal karena Bapenda berisiko mengalami "fiscal cliff" yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya akibat pemotongan Dana Transfer Pusat. (Bird & Zolt, 2005) mengingatkan bahwa banyak pemerintah daerah di negara berkembang mengalami krisis fiskal karena tidak memiliki sistem monitoring keberlanjutan fiskal yang memadai. Kedua, ilusi kinerja yang menyesatkan dimana surplus anggaran dan peningkatan nominal PAD menciptakan persepsi bahwa kinerja sudah baik, padahal efektivitas PAD yang hanya 61.6% - 69.2% (jauh di bawah standar optimal 90%) menunjukkan masih banyak potensi yang belum tergali. Ketiga, strategi yang parsial dan tidak sustainable karena fokus pada target jangka pendek yang berisiko menciptakan disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi basis pajak di masa depan (Mahmudi, 2019). Keempat, hilangnya peluang optimalisasi sumber daya, rendahnya daya saing dalam mendapatkan insentif dari pemerintah pusat, serta kesulitan dalam manajemen utang daerah karena kreditor menilai kemampuan bayar berdasarkan indikator keberlanjutan fiskal.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan solusi komprehensif baik jangka pendek maupun jangka menengah. Untuk jangka pendek (1-2 tahun), Bapenda perlu membentuk Tim Khusus Pengembangan Sistem KKB yang bertugas melakukan kajian mendalam, menyusun SOP untuk pengumpulan data dan perhitungan indikator KKB, serta melakukan sosialisasi internal kepada seluruh pegawai. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi dan mampu menghitung indikator KKB secara otomatis dan real-time juga menjadi prioritas, karena menurut (Fernandes & Putri, 2022), sistem informasi perpajakan yang robust merupakan prasyarat bagi efektivitas pengelolaan pajak daerah dan pengukuran kinerja yang akurat. Pelatihan dan capacity building untuk memastikan seluruh pegawai memahami konsep KKB serta pilot project implementasi KKB untuk Pajak Air Tanah dapat dilakukan sebagai langkah awal mengingat penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikannya terhadap KKB.

Untuk jangka menengah (3-5 tahun), diperlukan reformasi komprehensif sistem administrasi perpajakan yang mencakup perbaikan database wajib pajak dengan implementasi sistem verifikasi silang dan teknologi GIS untuk pemetaan objek pajak, penguatan mekanisme pengawasan melalui peningkatan frekuensi pemeriksaan lapangan dan penerapan sanksi administratif yang tegas, serta digitalisasi layanan perpajakan yang menurut (Bird & Zolt, 2005) dapat meningkatkan compliance rate hingga 30-40%. Strategi intensifikasi melalui audit pajak terhadap wajib pajak besar dan program edukasi, serta ekstensifikasi melalui

pemetaan potensi pajak yang belum tergali perlu dilakukan secara terstruktur. Integrasi KKB dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renja Bapenda juga penting untuk memastikan komitmen dan akuntabilitas (Mahmudi, 2016). Mengingat kontribusi Pajak Air Tanah yang relatif kecil (kurang dari 2.5% dari total PAD), diversifikasi sumber PAD melalui optimalisasi pajak-pajak dengan potensi besar seperti Pajak Hotel dan Restoran, peningkatan retribusi daerah, serta optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi strategi fundamental untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau beberapa sumber pendapatan saja (Halim, 2014).

#### **4.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja**

##### **Keuangan Berkelanjutan**

Berdasarkan hasil uji t pada Model 1 (Tabel 4.13), diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 5.236E-10 dengan nilai t hitung 4.506 dan signifikansi 0.000 ( $< 0.05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penerimaan Pajak Air Tanah akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan daerah, yang dalam penelitian ini diukur menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal.

Hasil uji F pada Model 1 (Tabel 4.14) memperkuat temuan tersebut dengan nilai F hitung sebesar 20.305 dan signifikansi  $< 0.001$ , yang menunjukkan bahwa model regresi layak dan Penerimaan Pajak Air Tanah

secara signifikan mempengaruhi Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.370 (Tabel 4.17) mengindikasikan bahwa 37% variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan dapat dijelaskan oleh variabel Penerimaan Pajak Air Tanah, sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2016) yang menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam konteks otonomi daerah, Pajak Air Tanah sebagai komponen pajak daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Semakin optimal pemungutan Pajak Air Tanah, maka semakin besar kontribusinya terhadap kemandirian fiskal daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Widyawati, 2022) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Widyawati menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, meskipun realisasi Pajak Air Tanah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2021-2023 (dari 31.5% pada tahun 2021, meningkat drastis menjadi 49.5% pada tahun 2022, kemudian menurun

menjadi 41.5% pada tahun 2023), namun kontribusinya terhadap peningkatan rasio desentralisasi fiskal tetap signifikan secara statistik.

Perspektif teoritis dari (Halim, 2014) juga mendukung temuan ini, di mana dinyatakan bahwa semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal yang meningkat akan tercermin dalam Rasio Desentralisasi Fiskal yang lebih baik, yang merupakan indikator utama kinerja keuangan berkelanjutan dalam penelitian ini. Data menunjukkan bahwa meskipun Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Deli Serdang masih relatif rendah (berkisar antara 26.17% hingga 27.92%), namun terdapat tren peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja keuangan daerah seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah termasuk Pajak Air Tanah.

Dari perspektif keberlanjutan fiskal, temuan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (OECD, 2015) bahwa keberlanjutan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kebijakan fiskal jangka panjang tanpa menimbulkan risiko krisis keuangan. Kontribusi signifikan Pajak Air Tanah terhadap kinerja keuangan berkelanjutan menunjukkan bahwa optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah, menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

Namun demikian, volatilitas yang terjadi dalam penerimaan Pajak Air Tanah selama periode penelitian mengindikasikan perlunya perbaikan

sistemik dalam pengelolaan dan pemungutan pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh (Bird & Zolt, 2005), efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi dan predictability dalam proses pemungutan. Fluktuasi ekstrem yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan lemahnya infrastruktur administrasi pajak, yang dapat mengganggu keberlanjutan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap kinerja keuangan daerah di masa mendatang.

#### **4.3.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening**

Hasil uji t pada Model 2 (Tabel 4.15) menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 2.303 dengan nilai signifikansi 0.403 ( $> 0.05$ ), dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan memiliki koefisien sebesar 4,211,720,949 dengan nilai signifikansi 0.193 ( $> 0.05$ ). Hasil ini mengindikasikan bahwa baik Penerimaan Pajak Air Tanah maupun Kinerja Keuangan Berkelanjutan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Temuan uji F pada Model 2 (Tabel 4.16) memperkuat hasil tersebut dengan nilai F hitung sebesar 3.081 dan signifikansi 0.059 ( $> 0.05$ ), yang menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dalam hubungan antara Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan.

Dengan kata lain, pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan bersifat langsung (*direct effect*), bukan melalui mediasi PAD (*indirect effect*).

Hasil ini dapat dijelaskan dari beberapa perspektif teoritis dan empiris. Pertama, dari segi proporsi kontribusi, Pajak Air Tanah merupakan salah satu dari banyak komponen PAD. Data penelitian menunjukkan bahwa realisasi Pajak Air Tanah berkisar antara Rp 6 miliar hingga Rp 22.1 miliar per tahun, sementara realisasi PAD total mencapai Rp 926 miliar hingga Rp 1,049 triliun per tahun. Proporsi yang relatif kecil ini (kurang dari 2.5% dari total PAD) menyebabkan fluktuasi dalam Pajak Air Tanah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi perubahan PAD secara keseluruhan.

Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2014), PAD terdiri dari berbagai komponen termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, komponen PAD lain seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan berbagai jenis retribusi daerah memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan Pajak Air Tanah. Hal ini menyebabkan variasi dalam Pajak Air Tanah tidak secara signifikan menggerakkan total PAD.

Penelitian serupa yang mendukung hasil penelitian ini adalah studi oleh (Abiyi, 2024), yang menemukan bahwa pajak air tanah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD secara parsial, sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memberikan pengaruh signifikan

terhadap PAD. Temuan ini memperkuat bahwa variasi dalam penerimaan pajak air tanah tidak mempengaruhi PAD secara kuat karena PAD terdiri dari komponen-komponen lain yang lebih dominan dalam memberikan kontribusi.

Selain itu, penelitian oleh (Arrahman, 2023), yang menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak Air Tanah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Semarang, meskipun efektivitas penerimaan pajak ini dikategorikan sangat efektif pada beberapa tahun penelitian. Hasil ini menegaskan bahwa kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD relatif kecil dan tidak cukup dominan untuk memengaruhi total PAD secara signifikan.

Dari perspektif administrasi perpajakan, (Bird & Zolt, 2005) menekankan bahwa efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi dan predictability dalam proses pemungutan. Data penelitian menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang mengalami volatilitas yang sangat tinggi dengan tingkat capaian yang berfluktuasi drastis antar tahun. Ketidakstabilan ini mengindikasikan lemahnya infrastruktur administrasi pajak, sistem pendataan wajib pajak yang tidak memadai, dan inkonsistensi dalam mekanisme pengawasan dan pemungutan. Kondisi ini menyebabkan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD tidak stabil dan tidak dapat diandalkan sebagai variabel mediasi.

Selanjutnya, (Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa untuk PAD dapat berperan sebagai variabel intervening yang efektif, diperlukan stabilitas dan

predictability dalam penerimaan komponen-komponennya. Data menunjukkan bahwa meskipun PAD Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tren peningkatan nominal dari Rp 926 miliar (2021) menjadi Rp 1,049 triliun (2023), namun tingkat efektivitas PAD masih berfluktuasi dan belum mencapai standar optimal minimal 90%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PAD sendiri masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaannya, sehingga peran mediasinya terhadap hubungan antara komponen-komponennya dengan kinerja keuangan berkelanjutan menjadi tidak signifikan.

Meskipun PAD tidak berperan sebagai variabel intervening yang signifikan, temuan penelitian tetap menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Model 1). Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengaruh Pajak Air Tanah terhadap kinerja keuangan daerah tidak harus melalui mediasi PAD, tetapi dapat bersifat langsung melalui kontribusinya terhadap peningkatan rasio desentralisasi fiskal.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya fokus pada optimalisasi Pajak Air Tanah, tetapi juga pada perbaikan sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan, diversifikasi sumber-sumber PAD, dan penguatan kapasitas institusional Badan Pendapatan Daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fernandes & Putri, 2022), volatilitas dalam penerimaan pajak daerah dapat diatasi melalui

reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi pajak daerah, termasuk perbaikan database wajib pajak, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, dan optimalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan pemungutan pajak.

Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan secara langsung, namun PAD tidak berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dalam hubungan tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang mekanisme pengaruh komponen pajak daerah terhadap kinerja keuangan daerah, serta memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi realisasi penerimaan Pajak Air Tanah, maka akan semakin meningkat pula Kinerja Keuangan Berkelanjutan yang tercermin melalui peningkatan rasio desentralisasi fiskal daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah tidak berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dalam hubungan antara Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Hal ini dapat diketahui bahwa pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan bersifat langsung tanpa melalui mediasi Pendapatan Asli Daerah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan temuan-temuan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan melalui perbaikan database wajib pajak, implementasi sistem monitoring yang efektif, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Air Tanah, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi volatilitas penerimaan dan meningkatkan konsistensi pencapaian target pajak.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lain seperti pajak daerah lainnya dan retribusi daerah, memperpanjang periode pengamatan, menggunakan indikator kinerja keuangan yang lebih beragam, serta menerapkan pendekatan kualitatif atau mixed method untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas penerimaan Pajak Air Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Puspita, Y. A. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 4(4).
- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah*, 1, 1–16.
- Abiyyi, M. A. (2024). Analisis Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 35-47.
- Agurahe, Y. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).
- Agustini, Yetty, & Friani, Desi. (2021). Analisis potensi dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 6(1), 26–31.
- Arrahman, H. M. (2023). Efektivitas dan Pengaruh Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Ariska. F., & Shinta. S. D. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi UNIHAZ*.

- Asmandani, V., & Wicaksono, G. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. *Electronical Journal of Social and Political Sciences*.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2025). Serba-serbi Pajak Air Tanah yang Perlu Kamu Tahu. <https://dpp.jakarta.go.id/berita/serbaserbi-pajak-air-tanah-yang-perlu-kamu-tahu>
- Bashir, M. F., Ma, B., Shahzad, L., Liu, B., & Ruan, Q. (2021). China's quest for economic dominance and energy consumption: Can Asian economies provide natural resources for the success of One Belt One Road? *Management Decision Economics*, 42(3), 570–587. <https://doi.org/10.1002/mde.3255>
- Batubara, C., Kamila, K., & Saragih, A. M. (2024). Analisis Strategi Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1052-1062.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). The limited role of the personal income tax in developing countries. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 928-946.
- Chien, F., Sadiq, M., Nawaz, M. A., Hussain, M. S., Tran, T. D., & Le Thanh, T. (2021). A step toward reducing air pollution in top Asian economies: The role of green energy, eco-innovation, and environmental taxes. *Journal of Environmental Management*, 297, 113420. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113420>
- Dye, R. F., & Reschovsky, A. (2008). Property tax responses to state aid cuts in the recent fiscal crisis. *Public Budgeting & Finance*, 28(2), 87-111.
- Febriyanti, R. (2022). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 5(1), 78-92.
- Fernandes, A., & Putri, D. M. (2022). Optimalisasi Pajak Daerah: Analisis Sistem Informasi dan Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(2), 112-128.

- Hafsah, H., & Khopipah, S. (2023). Persepsi Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Atas Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi, 10*, 1–13.
- Halide, A. (2019). *Keuangan daerah dan pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, Z., Rukmini, R., Sanjaya, S., Wahyudi, H., & Kalsum, U. (2018). *Pengantar perpajakan: Cara mudah menghitung pajak*. Perdana Publishing.
- Hidayat, M. S. (2024). Surplus Anggaran dan Kinerja Keuangan Daerah: Analisis Realitas di Balik Angka. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 7*(1), 34-48.
- Indonesia, K. K. R. (2021). Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jakarta: Bimtek*.
- Irfan, Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)* (S. Elizar (ed.)). UMSU Press.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–14.
- Jenita, Asri. (2025). Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Sebagai Pajak Daerah Di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2*(2), 851–863. Retrieved from <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0A>ISSN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Jakarta: Kemenkeu.

- Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum pajak*.(p.168).. Jakarta: Mitra Wacana.
- Mulyadi. (2007). Definisi Kinerja Keuangan. Dalam Jurnal Mirai Management (dikutip 2023).
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28.
- Nainggolan, E.P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1-6.
- Nomor, Undang undang, Umum, Ketentuan, Perpajakan, Tata Cara, Pendapatan, Anggaran, & Negara, Belanja. (2012). *I. pendahuluan 1.1*. 1–20.
- Novita, S., & Arza, F. I. (2024). Inkonsistensi Tax Effort dan Kapasitas Instiusional Pemungutan Pajak Daerah. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 9(2), 201-217.
- OECD. (2015). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2015*. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/eco\_surveys-idn-2015-en
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Pemkab Deli Serdang.

- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pemkab Deli Serdang.
- Pigou, A. C. (1920). *The economics of welfare*. Macmillan.
- Rahardjo, S. (2016). *Keuangan daerah: Teori dan praktik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rin Marka, Kemas, Agung Nugroho, Ari, & Zuhri, Nizwan. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. umsu press.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Rizky, M. F., Andini, R., & Raharjo, K. (2023). Efektivitas Sistem Perpajakan Daerah dan Infrastruktur Administrasi Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(3), 445-461.
- Sanjaya, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 1-9.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian, Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (p. 346). p. 346. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Suryadi Setiawan, Sujiyati, Indra Subekti, Ria Prasetyaningsih, Sri Hermuningsih. (2025). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada PT Akhasa Wira International Tbk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3, No.1, Januari 2025.

Suriyanti Mangkona, Wahdania Agussalim, Resky Nur Fadhilah, M. Arqam Gaffar, A. Suci Pratiwi Hasan. (2023). Perbandingan Kinerja Keuangan Pada PT. Vale Indonesia Tbk dan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. *Jurnal Mirai Management*, Vol. 8 Issue 3.

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 110

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widyawati, K. C. (2024). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah (sebelum dan pada sat pandemic covid-19). (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

Zhao, X., Li, J., & Li, Y. (2023). Impact of Environmental Tax on Corporate Sustainable Performance: Insights from High-Tech Firms in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 461.  
<https://doi.org/10.3390/ijerph20010461>







**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

| NO. URUT | URAIAN                                        | ANGGARAN                    |                           | REALISASI    |                           | REALISASI 2021 |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
|          |                                               | 2022                        | 2022                      | (%)          | 2021                      |                |
| 4        | PENDAPATAN DAERAH                             | 1.206.597.247,055,00        | 771.170.171.550,26        | 63,91        | 677.335.993.160,45        |                |
| 4.1      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 1.206.597.247,055,00        | 771.170.171.550,26        | 63,91        | 677.335.993.160,45        |                |
| 4.1.1    | Pajak Daerah                                  | 1.201.597.247,055,00        | 767.658.224.719,40        | 63,89        | 672.462.837.206,00        |                |
| 4.1.1.4  | Lain-lain PAD yang Sah                        | 5.000.000,000,00            | 3.511.946.930,86          | 70,24        | 4.893.155.654,45          |                |
| 5        | BELANJA DAERAH                                | 60.644.468,044,00           | 57.427.526.201,00         | 94,70        | 50.793.116.463,00         |                |
| 5.1      | BELANJA OPERASI                               | 58.729.737.328,00           | 55.969.666.201,00         | 95,30        | 50.179.346.463,00         |                |
| 5.1.1    | Belanja Pegawai                               | 38.563.212.086,00           | 38.013.839.576,00         | 98,58        | 35.030.017.128,00         |                |
| 5.1.2    | Belanja Barang dan Jasa                       | 20.166.525.842,00           | 17.955.826.725,00         | 89,04        | 15.129.929.235,00         |                |
| 5.2      | BELANJA MODAL                                 | 1.914.730.116,00            | 1.457.860.000,00          | 76,14        | 615.170.000,00            |                |
| 5.2.2    | Belanja Modal Perawatan dan Mesin             | 1.914.730.116,00            | 1.457.860.000,00          | 76,14        | 615.170.000,00            |                |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                    | <b>1.145.952.779.011,00</b> | <b>713.742.645.249,26</b> | <b>62,28</b> | <b>626.560.876.697,45</b> |                |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)</b> | <b>1.145.952.779.011,00</b> | <b>713.742.645.249,26</b> | <b>62,28</b> | <b>626.560.876.697,45</b> |                |

Lubuk Pakam, 1 Januari 2022  
**PENGUNA ANGGARAN**

MUHAMMAD SALIM SP. MS.I  
 NIP. 19710616 199803 1 009

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021, 2022, DAN 2023

| Nomor | JENIS PAJAK                                             | ANGGARAN                    | REALISASI 2021            | %            |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1     | Pajak Hotel - LRA                                       | 7.647.975.000,00            | 4.568.731.781,00          | 59,74        |
| 2     | Pajak Restoran - LRA                                    | 38.000.000.000,00           | 21.692.359.275,00         | 57,09        |
| 3     | Pajak Hiburan - LRA                                     | 4.000.000.000,00            | 1.451.776.607,00          | 36,29        |
| 4     | Pajak Reklame - LRA                                     | 15.000.000.000,00           | 10.996.152.449,00         | 73,31        |
| 5     | Pajak Penerangan Jalan - LRA                            | 295.105.000.000,00          | 183.793.206.292,00        | 62,28        |
| 6     | Pajak Parkir - LRA                                      | 11.000.000.000,00           | 4.111.433.217,00          | 37,38        |
| 7     | Pajak Air Tanah - LRA                                   | 19.000.000.000,00           | 6.390.450.844,00          | 33,63        |
| 8     | Pajak Sarang Burung Walet - LRA                         | 50.000.000,00               | 17.700.000,00             | 35,40        |
| 9     | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA              | 36.000.000.000,00           | 5.182.008.132,00          | 14,39        |
| 10    | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA    | 512.719.272.055,00          | 192.217.130.174,00        | 37,49        |
| 11    | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA | 250.000.000.000,00          | 242.041.888.735,00        | 96,82        |
|       | <b>JUMLAH</b>                                           | <b>1.188.522.247.055,00</b> | <b>672.462.837.506,00</b> | <b>56,58</b> |
| 12    | Lain-lain PAD yang SAH Lainnya                          | 30.000.000.000,00           | 4.893.155.654,45          | 16,31        |
| 13    | Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain            |                             | 114.063.399,00            |              |
| 14    | Pendapatan Denda Pajak Hotel                            |                             | 2.055.842,08              |              |
| 15    | Pendapatan Denda Pajak Restoran                         |                             | 86.671.592,98             |              |
| 16    | Pendapatan Denda Pajak Hiburan                          |                             | 6.815.897,00              |              |
| 17    | Pendapatan Denda Pajak Reklame                          |                             | 18.953.459,00             |              |
| 18    | Pendapatan Denda Pajak Parkir                           |                             | 8.848.213,50              |              |
| 19    | Pendapatan Denda Pajak ABT                              |                             | 55.549.112,89             |              |
| 20    | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet              |                             | 36.000,00                 |              |
| 21    | Pendapatan Denda Galian C                               |                             | 252.000,00                |              |
| 22    | Pendapatan Denda PBB P2                                 | 30.000.000.000,00           | 4.587.001.047,00          | 15,30        |
| 23    | Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA                      |                             | 12.909.091,00             |              |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>1.218.522.247.055,00</b> | <b>677.335.993.160,45</b> | <b>55,59</b> |

| Nomor | JENIS PAJAK                                             | ANGGARAN                    | REALISASI 2023            | %            |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1     | Pajak Hotel - LRA                                       | 10.000.000.000,00           | 9.093.789.233,00          | 90,94        |
| 2     | Pajak Restoran - LRA                                    | 49.142.500.000,00           | 43.622.306.334,00         | 88,77        |
| 3     | Pajak Hiburan - LRA                                     | 9.980.000.000,00            | 8.320.462.550,00          | 83,37        |
| 4     | Pajak Reklame - LRA                                     | 20.125.000.000,00           | 11.364.920.136,00         | 56,47        |
| 5     | Pajak Penerangan Jalan - LRA                            | 295.000.000.000,00          | 213.042.327.681,00        | 72,22        |
| 6     | Pajak Parkir - LRA                                      | 18.345.000.000,00           | 11.309.022.817,00         | 61,65        |
| 7     | Pajak Air Tanah - LRA                                   | 20.700.000.000,00           | 10.579.516.910,00         | 51,11        |
| 8     | Pajak Sarang Burung Walet - LRA                         | 3.086.250.000,00            | 7.100.000,00              | 0,23         |
| 9     | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA              | 16.000.000.000,00           | 2.564.438.695,00          | 16,03        |
| 10    | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA    | 565.704.443.305,00          | 220.558.219.773,00        | 38,99        |
| 11    | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA | 260.000.000.000,00          | 267.272.114.049,00        | 102,80       |
|       | <b>JUMLAH</b>                                           | <b>1.268.083.193.305,00</b> | <b>797.734.218.178,00</b> | <b>62,91</b> |
| 12    | Lain-lain PAD yang SAH Lainnya                          | 7.000.000.000,00            | 3.965.292.788,22          | 56,65        |
| 13    | Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain            |                             | 15.368.815,10             |              |
| 14    | Pendapatan Denda Pajak Hotel                            |                             | 17.502.288,00             |              |
| 15    | Pendapatan Denda Pajak Restoran                         |                             | 76.656.299,00             |              |
| 16    | Pendapatan Denda Pajak Hiburan                          |                             | 49.581.047,00             |              |
| 17    | Pendapatan Denda Pajak Reklame                          |                             | 16.657.473,54             |              |
| 18    | Pendapatan Denda Pajak Parkir                           |                             | 8.406.160,00              |              |
| 19    | Pendapatan Denda Pajak ABT                              |                             | 35.954.713,58             |              |
| 20    | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet              |                             |                           |              |
| 21    | Pendapatan Denda Galian C                               |                             | 373.940,00                |              |
| 22    | Pendapatan Denda PBB P2                                 | 7.000.000.000,00            | 3.744.792.052,00          | 53,50        |
| 23    | Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA                      |                             |                           |              |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>1.275.083.193.305,00</b> | <b>801.699.510.966,22</b> | <b>62,87</b> |

→ PAD.

| no | JENIS PAJAK                                             | ANGGARAN                    | REALISASI 2022            | %            |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
|    | Pajak Hotel - LRA                                       | 8.247.975.000,00            | 5.997.886.543,00          | 72,72        |
|    | Pajak Restoran - LRA                                    | 38.750.000.000,00           | 35.612.706.786,00         | 91,90        |
|    | Pajak Hiburan - LRA                                     | 5.200.000.000,00            | 6.231.245.474,00          | 119,83       |
|    | Pajak Reklame - LRA                                     | 17.500.000.000,00           | 11.283.642.306,00         | 64,48        |
|    | Pajak Penerangan Jalan - LRA                            | 295.105.000.000,00          | 203.334.563.003,00        | 68,90        |
|    | Pajak Parkir - LRA                                      | 13.000.000.000,00           | 6.645.503.456,00          | 51,12        |
|    | Pajak Air Tanah - LRA                                   | 18.000.000.000,00           | 22.128.115.376,40         | 122,93       |
|    | Pajak Sarang Burung Walet - LRA                         | 75.000.000,00               | 10.600.000,00             | 14,13        |
|    | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA              | 30.000.000.000,00           | 1.042.473.810,00          | 3,47         |
| 0  | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA    | 507.219.272.055,00          | 217.199.292.039,00        | 42,82        |
| 1  | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA | 268.500.000.000,00          | 258.172.195.926,00        | 96,15        |
|    | <b>JUMLAH</b>                                           | <b>1.201.597.247.055,00</b> | <b>767.658.224.719,40</b> | <b>63,89</b> |
| 12 | Lain-lain PAD yang SAH Lainnya                          | 5.000.000.000,00            | 3.511.946.830,86          | 70,24        |
| 13 | Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain            |                             | 71.669.707,58             |              |
| 14 | Pendapatan Denda Pajak Hotel                            |                             | 8.046.747,00              |              |
| 15 | Pendapatan Denda Pajak Restoran                         |                             | 66.220.810,00             |              |
| 16 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan                          |                             | 51.553.980,00             |              |
| 17 | Pendapatan Denda Pajak Reklame                          |                             | 24.373.143,78             |              |
| 18 | Pendapatan Denda Pajak Parkir                           |                             | 12.922.023,00             |              |
| 19 | Pendapatan Denda Pajak ABT                              |                             | 75.552.533,50             |              |
| 20 | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet              |                             | 150.000,00                |              |
| 21 | Pendapatan Denda Galian C                               |                             | 661.360,00                |              |
| 22 | Pendapatan Denda PBB P2                                 | 5.000.000.000,00            | 3.200.796.526,00          | 64,02        |
| 23 | Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA                      |                             |                           |              |
|    | <b>TOTAL</b>                                            | <b>1.206.597.247.055,00</b> | <b>771.170.171.550,26</b> | <b>63,91</b> |



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| NO.<br>URUT | URAIAN                                                                         | CAT         | SALDO                |                      | KENAIKAN/<br>(PENURUNAN) | (%)     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|
|             |                                                                                |             | 2023                 | 2022                 |                          |         |
|             | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                                    |             |                      |                      |                          |         |
|             | <b>PENDAPATAN - LO</b>                                                         | 5.4.1       |                      |                      |                          |         |
| 7           |                                                                                | 5.4.1.1     | 3,698,729,648,411.79 | 3,432,476,803,502.58 | 266,252,844,909.21       | 7.78    |
|             | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                  | 5.4.1.1.1   | 1,096,010,605,946.79 | 1,073,726,540,660.81 | 22,284,065,285.98        | 2.08    |
| 7.1.1       | Pajak Daerah - LO                                                              | 5.4.1.1.1.1 | 850,926,578,700.46   | 818,554,111,559.00   | 32,372,467,141.46        | 3.95    |
| 7.1.2       | Retribusi Daerah - LO                                                          | 5.4.1.1.1.2 | 43,159,726,515.00    | 30,847,153,926.00    | 12,312,572,589.00        | 39.91   |
| 7.1.3       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO                         | 5.4.1.1.1.3 | 19,681,368,926.00    | 21,867,448,711.00    | -2,186,079,785.00        | -10.00  |
| 7.1.4       | Lain-lain PAD Yang Sah - LO                                                    | 5.4.1.1.1.4 | 182,242,931,805.33   | 202,457,786,464.81   | -20,214,854,659.48       | -9.98   |
| 7.2         | <b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>                                                | 5.4.1.1.2   | 2,555,856,006,580.00 | 2,276,193,588,246.00 | 279,662,418,334.00       | 12.29   |
| 7.2.1       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO                                      | 5.4.1.1.2.1 | 2,199,186,595,388.00 | 1,918,299,372,526.00 | 280,887,222,862.00       | 14.64   |
| 7.2.2       | Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO                                          | 5.4.1.1.2.2 | 344,990,012,192.00   | 357,894,215,720.00   | -12,904,203,528.00       | -3.61   |
| 7.3         | <b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>                               | 5.4.1.1.3   | 46,863,035,885.00    | 82,556,674,595.77    | -35,693,638,710.77       | -43.24  |
| 7.3.1       | Pendapatan Hibah - LO                                                          | 5.4.1.1.3.1 | 46,863,035,885.00    | 82,556,674,595.77    | -35,693,638,710.77       | -43.2   |
| 7.3.2       | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO | 5.4.1.1.3.2 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 8           | <b>BEBAN</b>                                                                   | 5.4.1.2     | 3,447,677,723,590.39 | 3,130,742,123,226.73 | 316,935,600,363.66       | 10.12   |
| 8.1.1       | Beban Pegawai                                                                  | 5.4.1.2.1   | 1,295,186,666,393.00 | 1,319,449,631,247.00 | -24,262,964,854.00       | -1.84   |
| 8.1.2       | Beban Barang dan Jasa                                                          | 5.4.1.2.2   | 1,194,895,576,167.71 | 1,050,058,023,557.66 | 144,837,552,610.05       | 13.79   |
| 8.1.3       | Beban Bunga                                                                    |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 8.1.4       | Beban Subsidi                                                                  |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 8.1.5       | Beban Hibah                                                                    |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 8.1.6       | Beban Bantuan Sosial                                                           | 5.4.1.2.3   | 236,617,987,440.24   | 23,003,798,950.00    | 213,614,188,490.24       | 928.60  |
| 8.1.6.1     | Beban Bantuan Sosial                                                           | 5.4.1.2.3.1 | 114,260,000.00       | 0.00                 | 114,260,000.00           |         |
| 8.1.7       | Beban Pemeliharaan Peralatan                                                   | 5.4.1.2.5   | 633,043,159.45       | 48,294,609,733.53    | -47,661,566,574.08       | -98.69  |
| 8.1.8       | Beban Lain-lain                                                                | 5.4.1.2.6   | 0.00                 | 8,974,915,651.30     | -8,974,915,651.30        | -100.00 |
| 8.2.1       | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                                           | 5.4.1.2.7   | 101,006,904,748.09   | 95,385,723,127.04    | 5,621,181,621.05         | 5.89    |
| 8.2.2       | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                                           | 5.4.1.2.7.1 | 91,999,861,708.00    | 89,269,307,350.00    | 2,730,554,358.00         | 3.06    |
| 8.2.3       | Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi                                              | 5.4.1.2.7.2 | 291,622,731,540.90   | 282,045,143,390.20   | 9,577,588,150.70         | 3.40    |
| 8.2.4       | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya                                            | 5.4.1.2.7.3 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 8.2.5       | Beban Penyusutan Aset Lainnya                                                  | 5.4.1.2.7.4 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 8.2.6       | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud                                           | 5.4.1.2.8   | 985,421,468.00       | 1,062,407,037.00     | -76,985,569.00           | -7.25   |
| 8.3.1       | Beban Bagi Hasil                                                               | 5.4.1.2.9   | 79,586,056,365.00    | 70,485,991,283.00    | 9,100,065,082.00         | 12.91   |
| 8.3.2       | Beban Bantuan Keuangan                                                         | 5.4.1.2.10  | 155,029,214,600.00   | 142,712,571,900.00   | 12,316,642,700.00        | 8.63    |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                                            |             | 251,051,924,821.40   | 301,734,680,275.85   | -50,682,755,454.45       | -16.80  |
|             | <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                                                | 5.4.2       |                      |                      |                          |         |
| 7.4.1       | Surplus Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar - LO                    | 5.4.2.1     | 145,108,942.11       | 1,370,132,476.44     | -1,225,023,534.33        | -89.41  |
| 7.4.2       | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO                             | 5.4.2.2     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 7.4.3       | Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO                             |             | 0.00                 | 306,186,425.43       | -306,186,425.43          | -100    |
| 8.5.1       | Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar - LO                    |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 8.5.2       | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO                             |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00    |
| 8.5.3       | Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO                             | 5.4.2.3     | 5,732,020,090.35     | 4,537,999,057.88     | 1,194,021,032.47         | 26.31   |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                           |             | 0.00                 | -2,861,680,155.99    | 3,766,484,409.15         | -56.83  |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>                                  |             | 0.00                 | 298,873,000,119.86   | -298,873,000,119.86      | -100    |
| 8.4.1       | <b>POS LUAR BIASA</b>                                                          | 5.4.3       |                      |                      |                          |         |
|             | Beban Tak Terduga                                                              | 5.4.3.1     | 127,833,036.00       | 260,634,155.00       | -132,801,119.00          | -50.95  |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>                                     |             | -127,833,036.00      | -260,634,155.00      | 132,801,119.00           | -50.95  |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                                                      | 5.4.4       | 245,346,180,637.14   | 298,612,365,964.85   | -53,266,185,327.69       | -17.84  |



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| NO.<br>URUT | URAIAN                                                                         | CAT         | SALDO                |                      | KENAIKAN/<br>(PENURUNAN) | [%]          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
|             |                                                                                |             | 2022                 | 2021                 |                          |              |
|             | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                                    |             |                      |                      |                          |              |
|             | <b>PENDAPATAN - LO</b>                                                         | 5.4.1       |                      |                      |                          |              |
| 7           |                                                                                | 5.4.1.1     | 3,432,476,803,502.58 | 3,261,029,840,324.28 | 171,446,963,178.30       | 5.26         |
|             | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                  | 5.4.1.1.1   | 1,073,726,540,660.81 | 1,013,429,784,434.47 | 60,296,756,226.34        | 5.95         |
| 7.1         | Pajak Daerah - LO                                                              | 5.4.1.1.1.1 | 818,554,111,559.00   | 727,006,579,441.00   | 91,547,532,118.00        | 12.59        |
| 7.1.1       | Retribusi Daerah - LO                                                          | 5.4.1.1.1.2 | 30,847,153,926.00    | 30,636,948,920.00    | 210,205,006.00           | 0.69         |
| 7.1.2       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO                         | 5.4.1.1.1.3 | 21,867,448,711.00    | 22,228,003,613.00    | -360,514,902.00          | -1.62        |
| 7.1.3       | Lain-lain PAD Yang Sah - LO                                                    | 5.4.1.1.1.4 | 202,457,786,464.81   | 233,558,252,460.47   | -31,100,465,995.66       | -13.32       |
| 7.1.4       | <b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>                                                | 5.4.1.1.2   | 2,276,193,588,246.00 | 2,228,011,015,368.00 | 48,182,572,878.00        | 2.16         |
| 7.2         | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO                                      | 5.4.1.1.2.1 | 1,918,299,372,526.00 | 2,006,228,095,218.00 | -87,928,722,878.00       | -4.38        |
| 7.2.1       | Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO                                          | 5.4.1.1.2.2 | 357,894,215,720.00   | 221,782,920,150.00   | 136,111,295,570.00       | 61.37        |
| 7.2.2       |                                                                                |             |                      |                      |                          |              |
| 7.3         | <b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>                               | 5.4.1.1.3   | 82,556,674,595.77    | 19,589,040,521.81    | 62,967,634,073.96        | 321.4        |
| 7.3.1       | Pendapatan Hibah - LO                                                          | 5.4.1.1.3.1 | 82,556,674,595.77    | 19,589,040,521.81    | 62,967,634,073.96        | 321.4        |
| 7.3.2       | Lain-lain Pendapatam Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO | 5.4.1.1.3.2 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         |
| 8           | <b>BEBAN</b>                                                                   | 5.4.1.2     | 3,130,742,123,226.73 | 3,122,133,750,360.55 | 8,608,372,966.18         | 0.28         |
| 8.1.1       | Beban Pegawai                                                                  | 5.4.1.2.1   | 1,319,449,631,247.00 | 1,315,097,129,306.00 | 4,352,501,941.00         | 0.33         |
| 8.1.2       | Beban Barang dan Jasa                                                          | 5.4.1.2.2   | 1,050,058,023,557.66 | 1,059,041,915,183.08 | -8,983,891,625.42        | -0.85        |
| 8.1.3       | Beban Bunga                                                                    |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         |
| 8.1.4       | Beban Subsidi                                                                  |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         |
| 8.1.5       | Beban Hibah                                                                    | 5.4.1.2.3   | 23,003,798,950.00    | 44,378,108,440.00    | -21,374,309,490.00       | -48.16       |
| 8.1.6       | Beban Bantuan Sosial                                                           | 5.4.1.2.4   | 0.00                 | 933,876,600.00       | -933,876,600.00          | -100.00      |
| 8.1.7       | Beban Penyisihan Piutang                                                       | 5.4.1.2.5   | 48,294,609,733.53    | 53,631,841,183.47    | -5,337,231,449.94        | -9.95        |
| 8.1.8       | Beban Lain-lain                                                                | 5.4.1.2.6   | 8,974,915,651.30     | 160,001.00           | 8,974,755,650.30         | 5,609,187.22 |
| 8.2.1       | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                                           | 5.4.1.2.7   | 95,385,723,127.04    | 84,561,576,469.00    | 10,824,146,658.04        | 12.80        |
| 8.2.2       | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                                           | 5.4.1.2.7   | 89,269,307,350.00    | 85,768,299,207.00    | 3,501,008,143.00         | 4.08         |
| 8.2.3       | Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi                                              | 5.4.1.2.7   | 282,045,143,390.20   | 273,065,364,759.00   | 8,979,778,631.20         | 3.29         |
| 8.2.4       | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya                                            | 5.4.1.2.7   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         |
| 8.2.5       | Beban Penyusutan Aset Lainnya                                                  | 5.4.1.2.7   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         |
| 8.2.6       | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud                                           | 5.4.1.2.8   | 1,062,407,037.00     | 838,130,205.00       | 224,276,832.00           | 26.76        |
| 8.3.1       | Beban Bagi Hasil                                                               | 5.4.1.2.9   | 70,485,991,283.00    | 63,836,693,307.00    | 6,649,297,976.00         | 10.42        |
| 8.3.2       | Beban Bantuan Keuangan                                                         | 5.4.1.2.10  | 142,712,571,900.00   | 140,980,655,600.00   | 1,731,916,300.00         | 1.23         |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                                            |             | 301,734,680,275.85   | 138,896,090,063.73   | 162,838,590,212.12       | 117.24       |
|             | <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                                                | 5.4.2       |                      |                      |                          |              |
| 7.4.1       | Surplus Penjualan/pertukaran /pelepasan Aset Non Lancar - LO                   | 5.4.2.1     | 1,370,132,476.46     | 0.00                 | 1,370,132,476.46         | 0.00         |
| 7.4.2       | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO                             | 5.4.2.2     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         |
| 7.4.3       | Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO                             |             | 306,186,425.43       | 48,335,104.32        | 257,851,321.11           | 533.47       |
| 8.5.1       | Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar - LO                    |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         |
| 8.5.2       | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO                             |             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         |
| 8.5.3       | Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO                             | 5.4.2.3     | 4,537,999,057.88     | 6,676,499,669.46     | -2,138,500,611.58        | -32.03       |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                           |             | -2,861,680,155.99    | -6,628,164,565.14    | 3,766,484,409.15         | -56.83       |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>                                  |             | 298,873,000,119.86   | 132,267,925,498.59   | 166,605,074,621.27       | 125.96       |
|             | <b>POS LUAR BIASA</b>                                                          | 5.4.3       |                      |                      |                          |              |
| 8.4.1       | Beban Tak Terduga                                                              | 5.4.3.1     | 260,634,155.00       | 10,628,247,278.00    | -10,367,613,123.00       | -97.55       |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>                                     |             | -260,634,155.00      | -10,628,247,278.00   | 10,367,613,123.00        | -97.55       |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                                                      | 5.4.4       | 298,612,365,964.83   | 121,639,678,220.59   | 176,972,687,744.27       | 145.49       |

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| URUT  | URAIAN                                              | CAT.           | ANGGARAN 2022        | REALISASI 2022       | (%)    | REALISASI 2021       |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
|       | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                            |                |                      |                      |        |                      |
|       | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 | <b>5.1.1</b>   | 4.179.153.051.919,00 | 3.731.018.449.348,21 | 89,28  | 3.539.280.627.629,33 |
| 1     | Pajak Daerah                                        | 5.1.1.1        | 1.504.964.363.832,00 | 1.041.732.670.188,21 | 69,22  | 926.137.759.153,33   |
| 2     | Retribusi Daerah                                    | 5.1.1.1.1      | 1.701.597.247.055,00 | 767.658.224.719,40   | 63,89  | 672.462.837.506,00   |
| 3     | Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.1.2      | 109.675.530.700,00   | 29.221.518.928,00    | 26,66  | 32.397.075.320,00    |
| 4     | Lain-lain PAD yang Sah                              | 5.1.1.1.3      | 21.867.488.711,00    | 21.867.488.711,00    | 100,00 | 22.228.003.613,00    |
|       |                                                     | 5.1.1.1.4      | 171.874.097.366,00   | 272.985.437.831,81   | 129,74 | 199.049.842.714,33   |
|       | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                          | <b>5.1.1.2</b> | 2.674.186.688.087,00 | 2.687.662.779.160,00 | 100,50 | 2.610.462.868.478,00 |
| 1     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                | 5.1.1.2.1      | 2.442.125.594.000,00 | 2.476.833.988.504,00 | 99,37  | 2.389.035.536.984,00 |
| 1.1   | Dana Pembiangan                                     | 5.1.1.2.1.1    | 2.118.167.469.000,00 | 2.102.971.484.504,00 | 99,28  | 2.033.322.283.144,00 |
| 1.2   | Dana Insentif Daerah (DID)                          | 5.1.1.2.1.6    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 43.678.973.000,00    |
| 1.3   | Dana Desa                                           | 5.1.1.2.1.7    | 323.958.125.000,00   | 323.862.404.000,00   | 99,97  | 312.024.280.840,00   |
| 1.5   | Pendapatan Transfer Antar Daerah                    | 5.1.1.2.2      | 232.063.094.087,00   | 260.828.890.656,00   | 112,40 | 221.427.331.492,00   |
| 2     | Pencapaian Bagi Hasil                               | 5.1.1.2.2.1    | 204.574.866.567,00   | 237.144.774.069,00   | 115,92 | 221.427.331.492,00   |
| 2.1   | Bantuan Keuangan                                    | 5.1.1.2.2.2    | 27.488.227.520,00    | 23.684.116.587,00    | 86,16  | 0,00                 |
|       | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>         | <b>5.1.1.3</b> | 0,00                 | 1.673.000.000,00     | 0,00   | 2.680.000.000,00     |
| 3     | Pendapatan Hibah                                    | 5.1.1.3.1      | 0,00                 | 1.623.000.000,00     | 0,00   | 2.680.000.000,00     |
|       | <b>BELANJA DAERAH</b>                               | <b>5.1.2</b>   | 4.353.532.665.140,00 | 3.748.825.178.210,85 | 86,11  | 3.473.760.778.918,05 |
|       | <b>BELANJA OPERASI</b>                              | <b>5.1.2.1</b> | 3.115.109.173.175,00 | 2.641.356.377.407,08 | 84,79  | 2.424.674.840.910,00 |
| 1     | Belanja Pegawai                                     | 5.1.2.1.1      | 1.598.630.297.804,00 | 1.317.944.293.617,00 | 82,44  | 1.315.013.905.179,00 |
| 1.1   | Belanja Barang dan Jasa                             | 5.1.2.1.2      | 1.353.613.303.508,00 | 1.166.181.224.429,08 | 86,15  | 1.068.303.505.091,00 |
| 1.3   | Belanja Hibah                                       | 5.1.2.1.3      | 167.865.571.863,00   | 157.230.859.361,00   | 93,54  | 40.423.554.040,00    |
| 1.6   | Belanja Bantuan Sosial                              | 5.1.2.1.4      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 933.876.600,00       |
|       | <b>BELANJA MODAL</b>                                | <b>5.1.2.2</b> | 671.766.803.782,00   | 563.480.586.115,77   | 83,88  | 520.913.969.424,05   |
| 2     | Belanja Modal Tanah                                 | 5.1.2.2.1      | 22.867.341.183,00    | 13.510.309.560,00    | 59,08  | 11.736.361.400,00    |
| 2.1   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                   | 5.1.2.2.2      | 142.544.101.642,00   | 119.306.281.401,00   | 83,70  | 96.499.368.974,00    |
| 2.2   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                   | 5.1.2.2.3      | 120.226.978.381,00   | 103.078.597.202,77   | 85,74  | 105.842.461.369,05   |
| 2.3   | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi         | 5.1.2.2.4      | 371.236.479.610,00   | 313.424.544.133,00   | 84,41  | 289.323.492.475,00   |
| 2.4   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                    | 5.1.2.2.5      | 14.831.902.966,00    | 14.160.853.799,00    | 95,48  | 17.512.285.186,00    |
|       | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                        | <b>5.1.2.3</b> | 29.500.000.000,00    | 6.727.247.505,00     | 22,80  | 11.330.338.835,00    |
| 3     | Belanja Tidak Terduga                               | 5.1.2.3.1      | 29.500.000.000,00    | 6.727.247.505,00     | 22,80  | 11.330.338.835,00    |
|       | <b>BELANJA TRANSFER</b>                             | <b>5.1.3</b>   | 537.156.688.183,00   | 537.060.967.183,00   | 99,98  | 516.841.679.747,00   |
| 4     | Belanja Bagi Hasil                                  | 5.1.3.1        | 70.485.991.283,00    | 70.485.991.283,00    | 100,00 | 62.826.693.207,00    |
| 4.1   | Belanja Bantuan Keuangan                            | 5.1.3.2        | 466.670.696.900,00   | 466.574.975.900,00   | 99,98  | 453.004.926.440,00   |
| 4.2   |                                                     |                |                      |                      |        |                      |
|       | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                          |                | (174.379.613.221,00) | (17.606.728.862,64)  | 10,10  | 65.519.648.713,28    |
|       | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                            | <b>5.1.4</b>   |                      |                      |        |                      |
|       | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                        | <b>5.1.4.1</b> | 192.379.613.221,00   | 192.513.862.275,70   | 100,07 | 140.275.758.560,42   |
| 6     | Sisa Lebih Pemertugan Anggaran Tahun Sebelumnya     | 5.1.4.1        | 192.379.613.221,00   | 192.379.613.221,70   | 100,00 | 140.217.596.560,42   |
| 6.1   | Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah       | 5.1.4.1        | 0,00                 | 134.249.054,00       | 0,00   | 58.202.000,00        |
| 6.1.1 |                                                     |                |                      |                      |        |                      |
| 6.1.5 |                                                     |                |                      |                      |        |                      |
|       | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                       | <b>5.1.4.2</b> | 18.000.000.000,00    | 0,00                 | 0,00   | 13.416.034.052,00    |
| 6.2   | Penyortan Modal Daerah                              | 5.1.4.2        | 18.000.000.000,00    | 0,00                 | 0,00   | 13.416.034.052,00    |
| 6.2.1 |                                                     |                |                      |                      |        |                      |
| 6.2.2 |                                                     |                |                      |                      |        |                      |
|       | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                             | <b>5.1.4.3</b> | 174.379.613.221,00   | 192.513.862.275,70   | 110,40 | 126.859.764.508,42   |
|       | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>       | <b>5.1.4.4</b> | 0,00                 | 174.907.133.413,06   | 0,00   | 192.379.613.221,70   |



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| URUT   | URAIAN                                                       | CAT.           | ANGGARAN 2023        | REALISASI 2023       | (%)    | REALISASI 2022       |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
|        | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                     | <b>5.1.1</b>   | 4.401.020.036.873,00 | 3.852.849.249.223,33 | 87,54  | 3.731.018.449.348,21 |
|        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                          | <b>5.1.1.1</b> | 1.591.571.684.311,00 | 1.049.321.671.723,33 | 65,93  | 1.041.732.670.186,21 |
| 11     | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 5.1.1.1.1      | 1.268.083.193.305,00 | 797.734.218.178,00   | 62,91  | 767.658.224.719,40   |
| 12     | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 5.1.1.1.2      | 107.838.378.704,00   | 43.129.679.515,00    | 39,99  | 29.221.518.926,00    |
| 13     | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disisahkan | 5.1.1.1.3      | 19.681.368.926,00    | 19.681.368.926,00    | 100,00 | 21.867.488.711,00    |
| 14     | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 5.1.1.1.4      | 196.068.743.376,00   | 188.776.405.104,33   | 96,28  | 222.985.437.831,81   |
|        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>5.1.1.2</b> | 2.809.348.352.562,00 | 2.803.527.577.500,00 | 99,79  | 2.687.662.779.160,00 |
|        | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>                             | 5.1.1.2.1      | 2.552.991.454.000,00 | 2.547.684.285.288,00 | 99,79  | 2.426.833.888.504,00 |
| 11     | Dana Perimbangan                                             | 5.1.1.2.1.1    | 2.192.827.991.000,00 | 2.188.267.745.388,00 | 99,79  | 2.102.971.484.504,00 |
| 11.01  | Dana Insentif Daerah (DID)                                   | 5.1.1.2.1.2    | 11.679.399.000,00    | 11.679.399.000,00    | 100,00 | 0,00                 |
| 11.02  | Dana Desa                                                    | 5.1.1.2.1.3    | 348.484.064.000,00   | 347.737.140.900,00   | 99,79  | 323.862.404.000,00   |
| 11.03  | TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH                             | 5.1.1.2.2      | 256.356.898.562,00   | 255.843.292.212,00   | 99,80  | 260.828.890.656,00   |
| 11.04  | Pendapatan Bagi Hasil                                        | 5.1.1.2.2.1    | 243.584.898.562,00   | 243.584.898.562,00   | 100,00 | 237.144.774.059,00   |
| 11.05  | Bantuan Keuangan                                             | 5.1.1.2.2.2    | 12.772.000.000,00    | 12.258.393.650,00    | 95,98  | 23.684.116.587,00    |
| 11.06  | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH                                | <b>5.1.1.3</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 1.623.000.000,00     |
| 11.07  | Pendapatan Hibah                                             | 5.1.1.3.1      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 1.623.000.000,00     |
|        | <b>BELANJA</b>                                               | <b>5.1.2</b>   | 4.573.427.170.286,00 | 3.864.684.573.712,09 | 84,50  | 3.748.625.178.210,85 |
|        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       | <b>5.1.2.1</b> | 3.738.934.047.967,00 | 2.761.423.726.370,09 | 85,26  | 2.641.356.377.407,08 |
| 1      | Belanja Pegawai                                              | 5.1.2.1.1      | 1.502.061.912.449,00 | 1.301.585.415.181,00 | 86,65  | 1.317.944.293.617,00 |
| 1.01   | Belanja Barang dan Jasa                                      | 5.1.2.1.2      | 1.489.378.103.346,00 | 1.229.805.968.508,85 | 82,57  | 1.166.181.224.429,08 |
| 1.02   | Belanja Hibah                                                | 5.1.2.1.3      | 245.407.832.172,00   | 229.918.082.680,24   | 93,69  | 157.230.859.361,00   |
| 1.03   | Belanja Bantuan Sosial                                       | 5.1.2.1.4      | 2.086.200.000,00     | 114.260.000,00       | 5,48   | 0,00                 |
| 2      | <b>BELANJA MODAL</b>                                         | <b>5.1.2.2</b> | 736.247.603.354,00   | 518.703.185.644,00   | 70,45  | 563.480.586.115,77   |
| 2.01   | Belanja Modal Tanah                                          | 5.1.2.2.1      | 11.053.868.693,00    | 386.198.000,00       | 3,49   | 13.510.309.560,00    |
| 2.02   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                            | 5.1.2.2.2      | 130.414.972.092,00   | 107.153.807.888,00   | 82,16  | 119.306.281.401,00   |
| 2.03   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                            | 5.1.2.2.3      | 97.526.868.405,00    | 74.856.291.403,00    | 76,75  | 103.078.597.207,77   |
| 2.04   | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                    | 5.1.2.2.4      | 476.267.469.979,00   | 315.808.979.984,00   | 66,31  | 313.424.544.153,00   |
| 2.05   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                             | 5.1.2.2.5      | 20.981.424.185,00    | 20.497.908.369,00    | 97,68  | 14.160.853.799,00    |
| 3      | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                 | <b>5.1.2.3</b> | 15.000.000.000,00    | 2.205.249.833,00     | 14,70  | 6.727.247.505,00     |
| 3.01   | Belanja Tidak Terduga                                        | 5.1.2.3.1      | 15.000.000.000,00    | 2.205.249.833,00     | 14,70  | 6.727.247.505,00     |
| 4      | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                      | <b>5.1.2.4</b> | 583.745.518.965,00   | 582.352.411.865,00   | 99,85  | 537.060.967.183,00   |
| 4.1    | Belanja Bagi Hasil                                           | 5.1.2.4.1      | 79.687.974.365,00    | 79.586.056.365,00    | 99,87  | 70.485.991.283,00    |
| 4.1.01 | Belanja Bantuan Keuangan                                     | 5.1.2.4.2      | 503.557.544.600,00   | 502.766.355.500,00   | 99,84  | 466.574.975.900,00   |
| 4.1.02 |                                                              |                | (172.407.133.413,00) | (11.835.324.488,76)  | 0,00   | (17.606.728.862,64)  |
|        | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                   |                |                      |                      |        |                      |
|        | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                     | <b>5.1.4</b>   |                      |                      |        |                      |
|        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>5.1.4.1</b> | 174.907.133.413,00   | 174.933.313.575,82   | 100,01 | 192.513.862.275,70   |
| 1.1    | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)           | 5.1.4.1.1      | 174.907.133.413,00   | 174.907.133.413,06   | 100,00 | 192.379.613.221,70   |
| 1.1.01 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                 | 5.1.4.1.1      | 0,00                 | 26.180.162,76        | 0,00   | 134.249.054,00       |
| 1.1.02 | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                | <b>5.1.4.2</b> | 2.500.000.000,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 1.1.03 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah               | 5.1.4.2        | 2.500.000.000,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
|        | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                      | <b>5.1.4.3</b> | 172.407.133.413,00   | 174.933.313.575,82   | 101,47 | 192.513.862.275,70   |
|        | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>                | <b>5.1.4.4</b> | 0,00                 | 163.097.989.087,06   | 0,00   | 174.907.133.413,06   |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

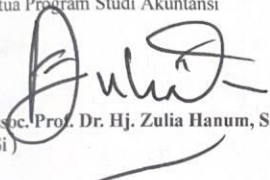
Nomor Agenda: 370/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/04/2025

Nama Mahasiswa : PUTRI NURHASANAH HALAWA  
NPM : 2105170076  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 25/04/2025  
Nama Dosen pembimbing\*) : Elizar Sinambela, S.E., M.Si (06 Mei 2025)

Judul Disetujui\*\*)

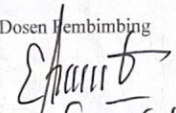
Pengaruh penemuan papak air dan tanah terhadap PAD untuk kinerja keuangan berkelampahan (Studi BAPENDA DELI SERDANG)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
( Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si )

Medan, .....

Dosen Pembimbing

  
Elizar Sinambela, SE, M.Si

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



da Yth.  
 ik Dekan  
 litas Ekonomi  
 .Muhammadiyah Sumatera Utara

## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

yang bertanda tangan dibawah ini :

a Lengkap : PUTRI NUR HASANAH  
 i : 2105170076  
 pat/Tgl Lahir : MEDAN  
 08 OKTOBER 2003  
 ram Studi : Akuntansi  
 nat Mahasisw : JL MERPATI NO 23 AEK  
 MANIS SIBOLGA SELATAN  
 pat Penelitian: BADAN KESATUAN  
 BANGSA DAN POLITIK  
 nat Penelitian : JL MEDAN-TEBINGTINGGI  
 ND4 PERBARAKAN

mohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.


ikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

revisi SPP tahap berjalan

Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
 Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
 Pemohon

  
 (Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., Msi)

  
 (Putri Nur Hasanah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/KBAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 2261/IL3-AU/UMSU-05/F/2025  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 27 Muharram 1447 H  
 22 Juli 2025 M

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang**  
 Kawasan Pemerintahan Deli Serdang, Jln. Medan - Tebing Tinggi No. 4 Perbarakan  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Nur Hasanah Halawa  
 Npm : 2105170076  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerimaan Pajak Air Dan Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan ( Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

**Dr. H. Hanauri, SE., MM., M.Si., CMA**  
 NIDN : 0109086502

Tembusan :  
 1. Pertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1749/K/BAK-PT/Ak.Paj/PT18/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**NOMOR : 2261/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2025**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 16 Juli 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Putri Nur Hasanah Halawa  
 N P M : 2105170076  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerimaan Pajak Air Dan Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan ( Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)


Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **22 Juli 2026**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 27 Muharram 1447 H  
 22 Juli 2025 M

  
 Dekan  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA**  
 NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
 1. Pertinggal





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. JENDERAL SUDIRMAN NO. 2 LUBUK PAKAM – 20514  
 TEL. ( 061 ) – 7955788 FAX. ( 061 ) - 7955788  
 Pos-el : bapenda@deliserdangkab.go.id Laman: <https://bapenda.deliserdangkab.go.id>

18 September 2025

Nomor : 4003.11/4066/2025  
 ifat : Biasa  
 ampiran : -  
 erihal : Izin Riset

th. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

empat

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 000.9/5464/BAPPEDALITBANG/2025 tanggal 01 Agustus 2025, perihal izin Riset Pendahuluan dan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2261/II.3-AU/UMSU-5/F/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Permohonan Izin Riset Pendahuluan, yang akan dilaksanakan oleh:

Nama : Putri Nur Hasanah Halawa  
 Alamat : Jl. Merpati No. 23  
 NIP / NIM / KTP : 1273034810030001  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Prodi / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis  
 Judul / Tema : Pengaruh Penerimaan Pajak Air dan Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Studi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)  
 Daerah / Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang  
 Lama : 3 (tiga) Bulan terhitung 29 Juli 2025 s.d 27 Oktober 2025  
 Peserta : Sendiri  
 Penanggung Jawab : Dr. H. Januari, SE, MM, M.Si, CMA

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui yang bersangkutan melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Setelah selesai melaksanakan Riset, agar menyampaikan hasil serta data-data yang diperoleh kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN DELI SERDANG  
 SEKRETARIS



ROBET JAKSEN SEMBIRING, S.T., M.Si  
 PEMBINA  
 NIP. 19740618 200903 1 002



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 15 Oktober 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Putri Nur Hasanah*  
 NPM. : *2105170076*  
 Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 08 Oktober 2003*  
 Alamat Rumah : *Jl. Alfalah Raya No.15 B*  
 Judul Proposal : *Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)*  
 Disetujui / tidak disetujui \*)

| Item       | Komentar                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Judul      | .....                                                                         |
| Bab I      | <i>Tambahi alasan yg kuat mengapa mau judul ini &amp; fenomena yg terjadi</i> |
| Bab II     | .....                                                                         |
| Bab III    | <i>Pastikan populasi, sampel, dan alat analisis.</i>                          |
| Lainnya    | <i>Referensi mohon diperhatikan 5 hkn online 10 hkn buku</i>                  |
| Kesimpulan | <input type="checkbox"/> Lulus<br><input type="checkbox"/> Tidak Lulus        |

Medan, 15 Oktober 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, SE, M.Sc

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pembanding

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 15 Oktober 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Putri Nur Hasanah  
NPM : 2105170076  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 08 Oktober 2003  
Alamat Rumah : Jl. Alfalah Raya No.15 B  
Judul Proposal : Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE, M.Si*

Medan, 15 Oktober 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, SE, M.Sc

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pembimbing

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si  
NIDN : 0105087601

27/10/2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : PUTRI NUR HASANAH  
NPM : 2105170076  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG)

| Item                                  | Hasil Evaluasi                                                                                                            | Tanggal | Paraf Dosen |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| BAB 1                                 | - Perjelas judul Penelitian.<br>- Perbaiki Latar Belakang Masalah<br>- Perbaiki Identifikasi Masalah<br>- Data penelitian | 7-25    | EA          |
| BAB 2                                 | - Rumusan Masalah & Tujuan<br>- Perbaiki Teori untuk Kinerja Berkelanjutan<br>- Perbaiki hipotesis                        | 16/7-25 | EA          |
| BAB 3                                 | - Perbaiki Indikator untuk Kinerja Berkelanjutan<br>- Perbaiki Populasi & Sampel<br>- Perjelas Teknik Analisis Data       | 19/7-25 | EA          |
| Daftar Pustaka                        | - Lengkapi Daftar pustaka sesuai Kriteria                                                                                 | 8/9-25  | EA          |
| Instrumen Pengumpulan Data Penelitian | - Perjelas Data yg akan digunakan<br>- Data Kinerja Keuangan Berkelanjutan                                                | 29/9-25 | EA          |
| Persetujuan Seminar Proposal          | Selamat Bimbingan<br>Acc & Seminar Acc                                                                                    | 3/10-25 | EA          |

Medan, September 2025

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Muhammad Shareza Hafiz S.E., M.Acc)

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AL.Pj/PT.01/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nomor : 3339/H.3.AU/UMSU-05/F/2025  
Lamp. :  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 16 Jumadil Awal 1447 H  
07 November 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang**  
Jln. Medan - Tebing Tinggi No.4 Perbarakan  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Nur Hasanah  
N P M : 2105170076  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerimaan Pajak Air Dan Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan  
**Dr. Radiman, S.E., M.Si**  
 NIDN. 0107087801

**Tembusan :**  
1. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PUSAT PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (P3UD)  
JL. MEDAN – LUBUK PAKAM, KECAMATAN TANJUNG MORAWA – 20362  
Pos-el : bapenda@deliserdangkab.go.id Laman: <https://bapenda.deliserdangkab.go.id>

Nomor : 400.3.11/4700/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Tanjung Morawa, 13 November 2025

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 3339/II.3.AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 07 November 2025 Hal menyelesaikan Riset dan surat kami Nomor : 400.3.11/4066/2025 tanggal 18 September 2025 Perihal Izin Riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, dapat kami di Informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswi, atas nama :

Nama : Putri Nur Hasanah  
N P M : 2105170076  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerimaan Pajak Air dan Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Kinerja Keuangan berkelanjutan (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 27 Oktober 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Deli Serdang  
Sekretaris,



Robet Jaksen Sembiring, S.T., M.Si  
Pembina / V/a  
NIP: 19740618 200903 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Putri Nur Hasanah Halawa  
NPM : 2105170078  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 8 Oktober 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara  
Alamat : Jl. Merpati No 23 Aek Manis Sibolga Selatan  
No. Telephone : 082362885654  
Email : [putrinurhasanah@gmail.com](mailto:putrinurhasanah@gmail.com)

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Putra Kennedy Halawa  
Pekerjaan : Nelayan  
Nama Ibu : Fitriyani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Merpati No 23 Aek Manis Sibolga Selatan  
No. Telephone : 082362885654

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD Negeri 081240  
SMP : SMP Negeri 3 Sibolga  
SMA : SMA Negeri 3 Sibolga  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, November 2025



(Putri Nur Hasanah Halawa)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Nur Hasanah Halawa  
N P M : 2105170076  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)”** adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,



Putri Nur Hasanah Halawa

Unggul | Cerdas | Terpercaya